



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

SALINAN

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

- Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN

Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

2. Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Perpustakaan Nasional adalah dokumen perencanaan Perpustakaan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.
3. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 2

Renstra Perpustakaan Nasional merupakan pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 3

- (1) Renstra Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - c. arah kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka kebijakan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.
- (2) Renstra Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 4

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1018

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum Organisasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia



LAMPIRAN
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Perpustakaan, menjelaskan:

- 1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- 2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus; dan
- 3) Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas dalam Pasal 7 ayat (1) butir c, menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air. Selaras dengan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) butir q menyatakan bahwa perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintahan baik pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

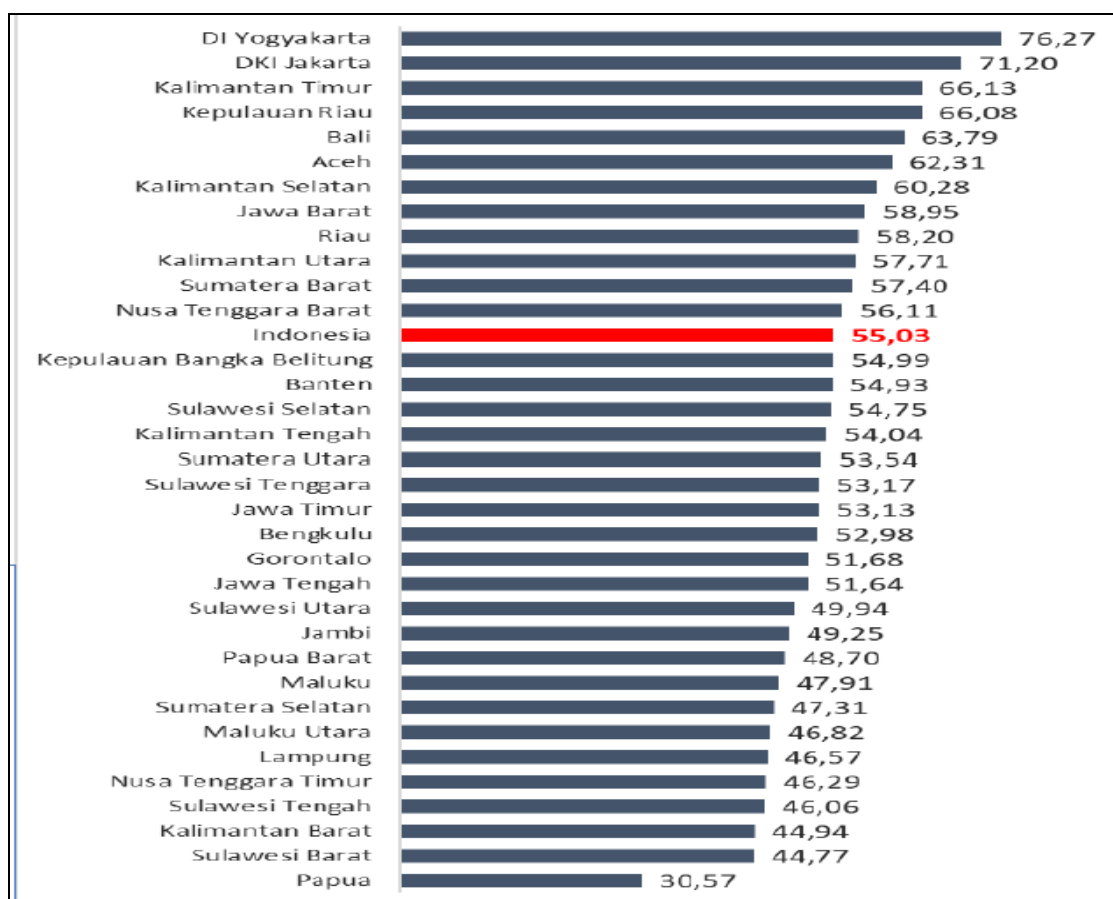
Loncatan peradaban dunia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan disrupsi yang sangat kuat di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kondisi ini mengharuskan terjadinya persaingan kompetitif antar individu dan antar bangsa. Oleh sebab itu, masyarakat berpengetahuan menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa untuk dapat menjawab persaingan global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran masyarakat berpengetahuan ini adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya literasi.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa dari salah satu ketujuh agenda pembangunan nasional adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki cara pikir yang terbuka, kritis, kreatif, dan memiliki karakter.

Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk *cognitive skill* memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Budaya literasi menjadi dimensi dalam indeks pembangunan kebudayaan pada RPJMN Tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Berdasarkan Survey BPS 2019 bahwa indeks nilai budaya literasi masih terus perlu ditingkatkan. Nilai Budaya literasi Indonesia tahun 2019 baru mencapai 55,03. Pengukuran budaya literasi diukur dalam tiga dimensi, yaitu: (i) persentase penduduk yang membaca selain kitab suci dengan nilai 45,72; (ii) persentase penduduk yang mengakses internet dengan nilai

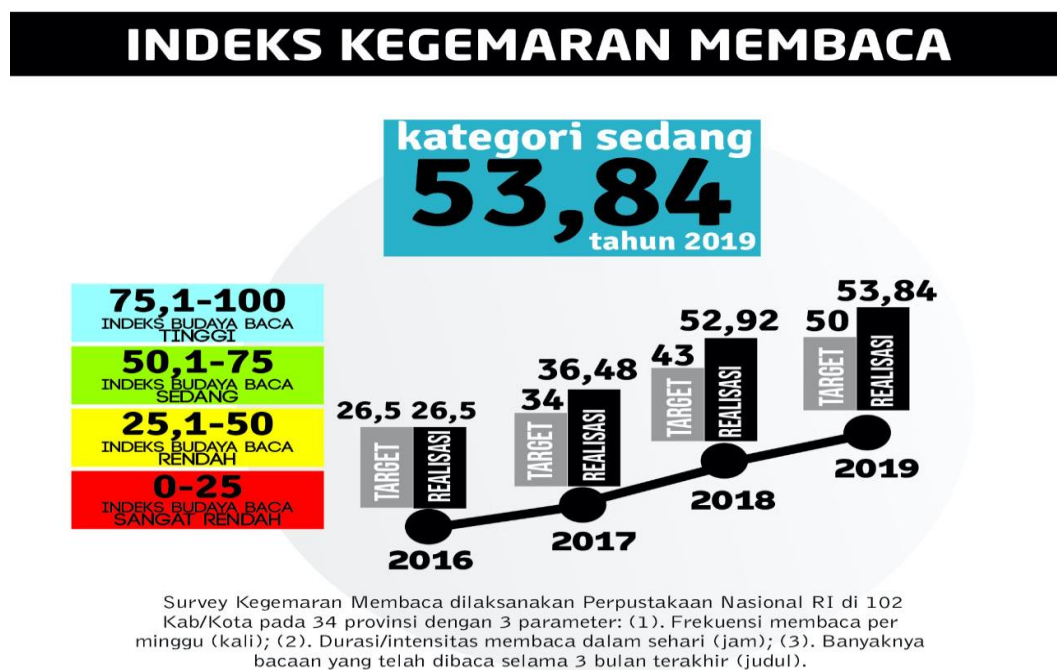
43,47; dan (iii) persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan dengan nilai 12,16.



Grafik 1.1.1. Nilai Budaya Literasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2019

Perkembangan literasi masyarakat di Indonesia sangat bergantung kepada kegemaran membaca masyarakat. Berdasarkan Kajian Budaya Baca Masyarakat Indonesia tahun 2019 menunjukkan rata-rata tingkat kegemaran membaca sebesar 53,84 atau berada pada kategori “sedang”. Terdapat 5 provinsi yang memiliki rata-rata tingkat kegemaran membaca dalam peringkat “tinggi”, yaitu (1) Provinsi D.I Yogyakarta, (2) Provinsi Jawa Timur, (3) Provinsi Jawa Tengah, (4) Provinsi Jawa Barat, dan (5) Provinsi DKI Jakarta. Survey Kegemaran Membaca di 102 kabupaten/kota pada 34 provinsi melibatkan 12.240 responden dengan tiga parameter, yaitu: (1) Frekuensi membaca per minggu (kali); (2) Durasi/intensitas membaca dalam sehari (jam); (3) Banyaknya bacaan yang telah dibaca selama 3 bulan terakhir (judul). Dari ketiga parameter tersebut menunjukkan indeks kegemaran membaca masyarakat sebesar 53.84. Secara rata-rata nasional nilai tingkat kegemaran membaca ini cenderung meningkat setiap tahun, seiring dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional dan juga Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas Perpustakaan.

Program dan kegiatan yang menunjang semakin membaiknya nilai tingkat kegemaran membaca, antara lain kampanye kegemaran membaca melalui safari, perlombaan, pengangkatan Duta Baca Indonesia dan Duta Baca Daerah, iklan layanan masyarakat di berbagai media, bantuan buku kepada komunitas, pondok pesantren, Lapas, Puskesmas, RSUD, perpustakaan sekolah, ekstensifikasi layanan perpustakaan melalui mobil perpustakaan keliling dan motor perpustakaan keliling serta pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di pedesaan dan bantuan perpustakaan daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.



Grafik 1.1.2. Indeks Kegemaran Membaca Indonesia 2016-2019

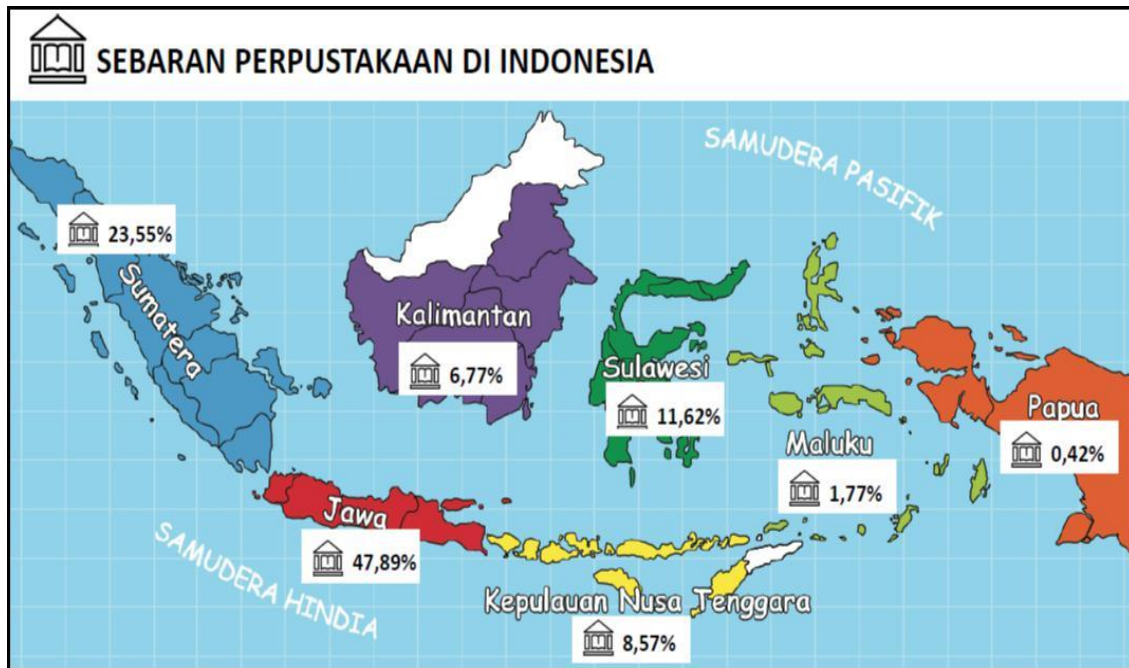
Perpustakaan sebagai *leading sector* pengembangan dan pembinaan dan kegemaran membaca diamanatkan untuk menjalankan sejumlah program terkait dengan pengembangan budaya literasi. Berdasarkan data yang ada capaian pengembangan perpustakaan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan termasuk juga peningkatan akses jurnal elektronik setelah melakukan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi informasi. Indonesia merupakan peringkat kedua terbanyak perpustakaan setelah negara India (323.605) dan capaian lainnya juga adalah Indonesia menjadi negara teratas dalam gerakan *open access journal* dunia (Natur International, 2018).

Berdasarkan data sensus Perpustakaan Nasional tahun 2018, dapat dirangkum jumlah perpustakaan secara nasional, sebagai berikut:

Tabel 1.1.1. Jumlah Perpustakaan Secara Nasional dirinci berdasarkan Jenis Perpustakaan

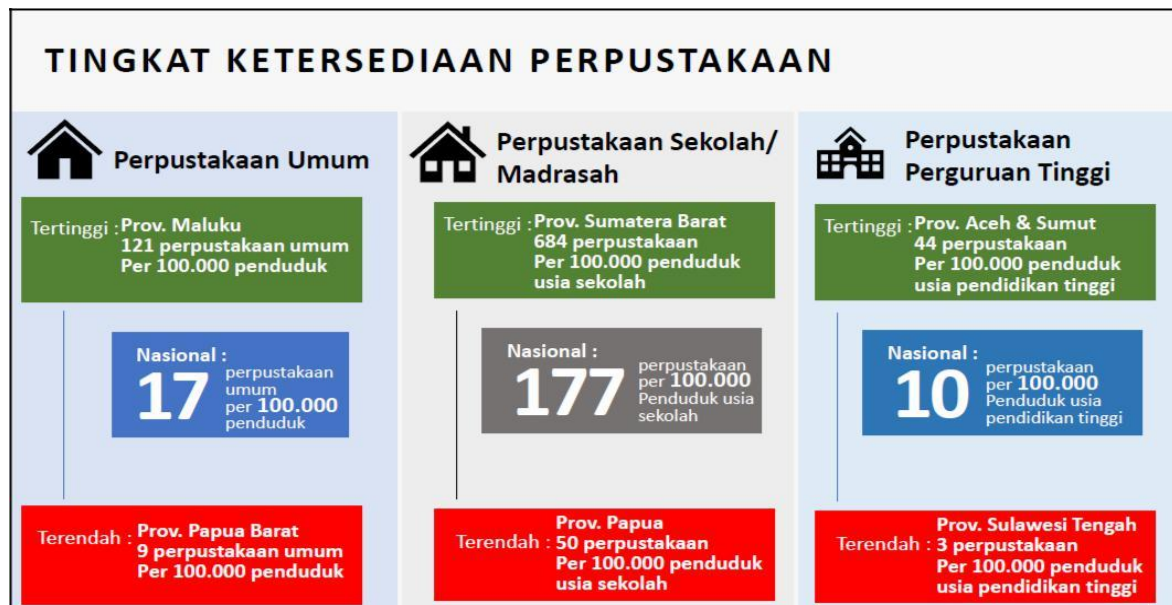
No.	Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan 2014-2019
1	Perpustakaan Umum	42.460
	a. Perpustakaan Umum Provinsi	34
	b. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	496
	c. Perpustakaan Umum Kecamatan	1.685
	d. Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan	33.929
	e. Perpustakaan Komunitas	1.018
	f. Taman Bacaan	5.298
2	Perpustakaan khusus	6.552
3	Perpustakaan Sekolah/Madrasah	113.541
	a. SD/MI	76.063
	b. SMP/TS	19.995
	c. SMA/SMK/MA	17.483
4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2.057
	Jumlah Total Perpustakaan	164.610

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah total perpustakaan secara nasional, yaitu sebanyak 164.610 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. 164.610 perpustakaan tersebut, terdiri dari 42.460 perpustakaan umum, 6.552 perpustakaan khusus, 113.541 perpustakaan sekolah/madrasah, dan 2.057 perpustakaan perguruan tinggi. Jika dirinci berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia, sebaran perpustakaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1.1. Sebaran Perpustakaan di Indonesia

Sebanyak 47,89% dari jumlah perpustakaan berada di pulau Jawa, selanjutnya sebanyak 23,55% berada di Sumatera dan sebanyak 11,62% berada di Sulawesi. Selanjutnya, jika dihitung rasio ketersediaan perpustakaan umum secara nasional adalah 0,00017, artinya hanya terdapat 17 perpustakaan per 100.000 penduduk.



Gambar 1.1.2. Infografis Tingkat Ketersediaan Perpustakaan

Tingkat ketersediaan perpustakaan sekolah/madrasah adalah yang paling tinggi, yaitu 0,00177, artinya terdapat 177 perpustakaan sekolah/madrasah per 100.000 penduduk usia sekolah/madrasah. Sedangkan tingkat ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi sebesar

0,00010 artinya hanya terdapat 10 perpustakaan perguruan tinggi per 100.000 penduduk usia pendidikan tinggi.

1.2 Inovasi Layanan Perpustakaan Nasional

Sejumlah inovasi yang dilakukan melalui penerapan teknologi informasi yang dapat difungsikan dalam berbagai bentuk bagian dalam proses bisnis. Di antaranya sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan. Bidang pekerjaan yang diintegrasikan dalam sistem ini adalah akuisisi, katalogisasi, sirkulasi, preservasi, dan berbagai laporan untuk kepentingan manajemen perpustakaan. Di samping itu, penerapan teknologi informasi dimanfaatkan sebagai sarana pendukung dalam aktifitas mendapatkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam kompleksitas layanan perpustakaan secara ekstensif dan intensif. Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan pembina segala jenis perpustakaan dituntut untuk memanfaatkan TIK sebagai sarana untuk penyediaan sumber belajar sepanjang hayat dan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Inovasi layanan Perpustakaan Nasional melalui teknologi informasi dan komunikasi, yaitu:

Pertama, **Indonesia OneSearch (IOS)**. Satu pintu pencarian untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, arsip dan sumber elektronik di Indonesia. Perpustakaan Nasional sebagai pusat jejaring serta pusat referensi dan penelitian yang berbentuk sebuah portal web terintegrasi data bibliografis dan *full text* dari berbagai perpustakaan di Indonesia, dalam tahap pengembangannya nantinya akan sangat berkontribusi bagi Indonesia yaitu terdapat fungsi anti plagiarisme. Saat ini isu plagiarisme adalah isu yang sedang hangat di kalangan pustakawan dan pemustaka. Menanggapi isu tersebut Perpustakaan Nasional mengembangkan IOS Versi 2.0 yang mengadopsi teknologi anti plagiarisme sehingga bisa digunakan pemustaka untuk pendeteksi plagiarisme pada suatu karya. Saat ini IOS juga menjadi repositori berbagai bahan perpustakaan dan maupun meningkatkan peringkat webometric perguruan tinggi. Sampai dengan bulan April tahun 2020 telah tergabung sebanyak 3.992 perpustakaan dan institusi dengan jumlah 9.020.481 unit entri dan 12,483,317 entri dengan duplikat di dalam Indonesia OneSearch dengan metode *harvesting* otomatis dari repositori milik organisasi mitra.

Kedua, **aplikasi perpustakaan digital (iPusnas)** adalah aplikasi perpustakaan digital bergerak berisi ribuan koleksi *e-Book* yang dapat dipinjam dan dibaca secara *online* dan *offline* melalui sistem operasi dan perangkat komputer seperti *smartphone*, dan desktop/laptop dilengkapi dengan *e-Reader* untuk membaca *e-Book* dan fitur media sosial. Dapat diunduh melalui *google play appstore* dan <https://ipusnas.id>. Perpustakaan Nasional meluncurkan iPusnas sebagai bentuk transformasi digital berbasis media sosial untuk meningkatkan budaya baca di Indonesia. Konten digital terkait dengan *Digital Right Manajemen* (DRM) yaitu mengatur siapa yang membaca, apa yang dibaca, kapan dibaca, bagaimana membacanya, berapa banyak bisa dibaca, dan variabel lainnya. Salah satu yang penting membuat DRM adalah sekuriti, dimana dalam mengakses konten digital perlu dibuat enkripsi pada *reader* dimana koleksi *full text* yang telah diindeks dalam IOS dapat ditampilkan dalam iPusnas sepanjang diizinkan oleh penerbit, ataupun perpustakaan yang telah bergabung dapat dibuatkan iPusnas. Selain itu semua aktifitas pemustaka dibuatkan *dashboard analytic*, sehingga dapat terpantau buku apa yang sering dibaca, pemanfaatannya, dan lainnya. Buku digital yang tersedia sebanyak 50.438 judul dan 591.793 salinan.

Ketiga, **Layanan e-Resources**. Adalah sumber bahan perpustakaan digital online (e-Resources) seperti jurnal, *e-Book*, dan karya-karya referensi online lainnya. Setiap anggota Perpustakaan Nasional dan telah memiliki nomor anggota yang sah, berhak memanfaatkan layanan koleksi digital online yang telah dilanggan (*e-Resources*). *E-Resources* Perpustakaan Nasional terdiri dari 10 database *e-Journal* sebanyak 605.078 judul terdiri dari jurnal nasional dan internasional. Hingga bulan April 2019 pengunjung *e-Resources* sebanyak 3.149.747 kunjungan.

Keempat, **Layanan International Standard Book Number (ISBN) Online**. ISBN diberikan oleh Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di London. Perpustakaan Nasional merupakan Badan Nasional ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada penerbit yang berada di wilayah Indonesia dan KDT (Katalog Dalam Terbitan). Proses pendaftaran penerbit, permintaan ISBN dan KDT telah dibuat lebih mudah dengan layanan satu pintu. Sekali informasi judul terbitan diserahkan, akan menjadi bagian dari database bibliografi dan akan muncul di terbitan Katalog Dalam Terbitan di Perpustakaan Nasional, yang memungkinkan perpustakaan maupun toko

buku yang mencari terbitan untuk dibeli mengetahui informasi terbitan terbaru.

1.3 Potensi dan Permasalahan

1.3.1 Potensi

Masyarakat berpengetahuan atau masyarakat literat menjadi fondasi sosial yang sangat kokoh untuk mendorong proses transformasi masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki watak kosmopolitanisme dan berkarakter dalam budaya. Bonus demografi Indonesia dan peningkatan jumlah penetrasi internet di Indonesia yang melonjak sampai dengan 52% penduduk Indonesia, menjadi permasalahan sendiri yang perlu dihadapi oleh Indonesia. Penguatan akses informasi melalui pengembangan perpustakaan saat ini masih terkendala kepada jumlah terbitan yang terbit di Indonesia yang saat ini masih terbilang kecil. Selain itu aksesibilitas masyarakat terhadap perpustakaan masih terkendala oleh faktor sebaran jumlah perpustakaan yang tidak merata serta faktor geografis.

Terbatasnya sarana prasarana perpustakaan agar dapat menjalankan fungsinya dan memberikan layanan kepada masyarakat pengguna dengan baik dan berkualitas perlu didukung adanya sarana prasarana yang memadai pula. Hal yang menjadi permasalahan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus menjadi perhatian khusus bagi pengembangan perpustakaan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, mengamanatkan bahwa untuk dapat menjalankan fungsinya perpustakaan harus dikelola oleh tenaga perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Tenaga Perpustakaan yang mencakup kualifikasi pendidikan, kompetensi dan sertifikasi. Kondisi sumber daya manusia secara kualitas (kualifikasi pendidikan perpustakaan) masih rendah, dimana dari jumlah yang ada yang memiliki kualifikasi pendidikan perpustakaan masih sangat terbatas, dan bahkan ada kecenderungan tenaga perpustakaan yang ada kebanyakan tenaga mutasi yang tidak memiliki kompetensi dibidangnya. Sehingga dengan kondisi semacam ini mengakibatkan kualitas layanan perpustakaan tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

Menurut UNDP dalam *Education for All Global Monitoring Report (2006:144)* menjelaskan adanya hubungan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia melalui literasi. Korelasi kuat

antara *gross domestic product* per kapita dengan indikator pembangunan, seperti angka harapan hidup, kematian bayi, hak politik dan sipil, serta beberapa indikator kualitas lingkungan, terutama literasi orang dewasa, yang diartikan dalam indeks pembangunan manusia.

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa harus hadir sebagai sistem sosial yang inklusif di masyarakat yang dapat terjangkau secara terbuka, mudah, dan murah dengan basis teknologi informasi untuk peningkatan budaya literasi masyarakat.

Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh amat besar terhadap segala aspek kehidupan saat ini. Pesatnya kemajuan teknologi informasi membuka kesempatan baru bagi perpustakaan untuk mengembangkan koleksi dari format konvensional ke format digital, mengembangkan layanan *onsite* ke layanan *online*, atau secara kompleksitas pengelolaan perpustakaan dari perpustakaan konvensional ke perpustakaan digital. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 14 ayat (3) bahwa setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Implementasi *Society 5.0* di sejumlah negara maju yang mengutamakan peran masyarakat cerdas dengan inovasi di bidang teknologi sebagai ujung tombaknya. Isu *Society 5.0* berpengaruh sangat besar terhadap layanan publik dimana masyarakat lebih banyak menuntut kemudahan dan transparansi dalam pelayanan publik. Salah satu layanan publik yang banyak mengalami perubahan adalah perpustakaan. Konsep *smart library* akan sangat populer, segala benda teknologi yang ada di dalam perpustakaan akan terintegrasikan dengan teknologi. Mulai dari data keanggotaan, hingga data koleksi yang akan bekerja secara pintar. Salah satunya dengan menggunakan *big data analytics* dan kecerdasan buatan. Konsep *smart library* akan banyak diadopsi saat ini. Peran manusia pun di bidang perpustakaan semakin minim dan tergantikan dengan teknologi. Pada masa depan koleksi digital akan lebih banyak dibanding koleksi tercetak, kecerdasan buatan akan menggantikan peran dalam layanan.

Perpustakaan sangat berpotensi besar untuk berintegrasi dengan isu society 5.0. Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam sadar betul mengenai potensi besar yang bisa dimanfaatkan sebagai inovasi dalam menyambut isu society 5.0.

Tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Bonus demografi merupakan kesempatan emas bagi Indonesia dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan salah satu cara pendukung agar Indonesia menjadi negara maju. Indonesia di masa depan diprediksi akan berada di kekuatan ekonomi nomor empat secara global. Negara-negara Eropa di dunia akan terlewati oleh Indonesia pada tahun 2030. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia maka pada tahun 2030 diperkirakan bakal membawa Indonesia ke posisi puncaknya. Untuk mempersiapkan masa puncak kemajuan ekonomi digital di Tanah Air, Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan memberikan layanan perpustakaan berbasis *cloud computing*, *big data analytics*, *artificial intelligence*, dan *digital business*.

Menindaklanjuti fenomena tersebut Perpustakaan Nasional mengajukan re-organisasi untuk mengubah Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sejumlah potensi yang bisa diadopsi pada struktur organisasi perpustakaan yang baru akan ditampung melalui fungsi perpustakaan sebagai berikut:

1. **Fungsi penelitian.** Perpustakaan sebagai pusat informasi mampu menjalankan sebagai fungsi penelitian dengan memberikan sejumlah informasi atau data yang valid dengan cepat dan tepat. Perpustakaan

sebagai fungsi penelitian saat ini harus diperkuat kualitas konten informasi perpustakaan yang dapat dilihat jika pemustaka puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan, maka sudah tentu pelayanan perpustakaan akan dianggap berkualitas. Fungsi ini akan banyak dijalankan oleh Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Pusat Data dan Informasi, Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca. Ketiga pusat ini akan mampu meningkatkan kualitas layanan melalui implementasi teknologi informasi dengan mengandalkan hal sebagai berikut :

- **Digital Research Production.** *Digital Research Production* merupakan sebuah konsep mengenai bagaimana perpustakaan menciptakan sebuah kanal penelitian terkait penelitian-penelitian perpustakaan digital dengan hasil akhir sebuah jaringan antar perpustakaan dapat direalisasi sebagai sebuah sistem yang menyediakan layanan-layanan untuk memberikan kemudahan bagi para pemustaka. Dalam hal ini, perlu dibangun sistem yang menjadikan seorang pemustaka yang membutuhkan sumber informasi dapat langsung menghubungi perpustakaan terdekat untuk bisa memperoleh sumber informasi yang dibutuhkan. Meskipun sumber informasinya tidak ada di perpustakaan terdekat, namun perpustakaan terdekat memiliki jaringan dengan perpustakaan di tempat lain yang dapat mengirimkan ke perpustakaan tersebut.
- **Repositori Institusi Nasional.** Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sumber informasi yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional, maka program sosialisasi atau pengenalan koleksi perpustakaan perlu dikembangkan dengan lebih baik lagi, terutama dengan mengarah pada target pasar, yaitu pemustaka, selain pengenalan perpustakaan melalui pustakawan. Persoalan yang sering terjadi adalah sosialisasi dari Perpustakaan Nasional ke pustakawan bisa tidak menghasilkan *follow up* bila pustakawan yang mengikuti sosialisasi tidak melanjutkan dengan sosialisasi lanjutan ke pemustaka. Mekanisme ini perlu dibangun agar sosialisasi dapat mengenai sasaran bukan terhenti di satu titik yang bukan tujuan.
- **Big Data Analytics.** Secara garis besar definisi *Big Data* merupakan kumpulan data sangat besar yang dapat dianalisis

secara komputasional untuk mengungkapkan pola, tren, dan asosiasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia. Interaksi ini membuat sebuah pola sehingga penggunaan data yang besar tersebut mampu menunjukkan kecenderungan seseorang merujuk pada penggunaan analisis prediktif, analisis perilaku pengguna, atau metode analisis data lanjutan tertentu lainnya yang mengekstraksi nilai dari data. Implementasi *big data analytics* akan mengubah penggunaan perpustakaan menjadi lebih efisien karena akan melihat bagaimana kecenderungan perpustakaan, bagaimana penggunaan koleksi perpustakaan serta akan mampu melihat bagaimana perkembangannya, jika perpustakaan mampu mengimplementasikan *big data analytics*.

2. **Fungsi Deposit.** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam merupakan dasar hukum bagi Perpustakaan Nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat deposit nasional. Sesuai dengan reorganisasi perpustakaan yang baru, fungsi ini akan dijalankan oleh Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan.
 - **Digital Publishing Market.** Konsepsi terkait pasar terbitan digital merupakan implementasi dari konsep penerbitan analog (biasa) ke dalam ranah konsepsi digital dimana penerbitan digital berkaitan dengan penyediaan konten di berbagai platform melalui perangkat elektronik terkomputerisasi. Teknologi digital terdiri dari berbagai platform untuk konten video, audio, dan teks, termasuk situs web, blog, dan situs jejaring sosial ke dalam penerbitan analog. Konsep ini adalah bagaimana mempertemukan penerbit, penulis serta pembaca kedalam suatu tempat yang sama. Perpustakaan Nasional RI mempunyai peran yang sangat penting dalam hal ini. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional mempunyai potensi yang sangat besar untuk mempertemukan semua pemangku kepentingan terkait industri penerbitan di Indonesia.
 - **e-Deposit.** Perpustakaan nasional merupakan perpustakaan yang bertanggung jawab atas akuisisi dan pelestarian kopi semua

terbitan yang signifikan, yang diterbitkan di sebuah negara dan berfungsi sebagai perpustakaan “deposit”, baik berdasarkan undang-undang maupun kesepakatan lain, dengan tidak memandang nama perpustakaan. Perpustakaan Nasional juga umumnya menjalankan fungsi sebagai berikut: menyusun bibliografi nasional; menyimpan dan memutakhirkan koleksi asing yang bernilai tinggi dan representatif termasuk buku mengenai negara yang bersangkutan; bertindak sebagai pusat bibliografi nasional; menyusun katalog induk; menerbitkan bibliografi nasional retrospektif. Perpustakaan yang menyebut dirinya sebagai perpustakaan “nasional” namun fungsinya tidak sesuai dengan definisi di atas tidak dapat dimasukkan ke kategori “perpustakaan nasional”. Sementara konsep e-Deposit merupakan karya elektronik atau bahan perpustakaan elektronik (*electronic library material*) yang tersedia secara *online* dan *offline*. Karya elektronik *online* adalah karya dikomunikasikan di (atau melalui) internet. Karya elektronik yang dipublikasi online mencakup *e-Books*, *e-Journal*, dan *website*. Sedangkan karya elektronik *offline* adalah karya yang disebarluaskan melalui media fisik dan disampaikan kepada masyarakat. Ada beberapa karakteristik karya elektronik *offline*, seperti materi/publikasi yang nyata, tersedia pada operator data fisik seperti disket dan CD-ROM, dan karya yang diidentifikasi sebagai publikasi elektronik dikemas (*packaged electronic publications*).

3. **Fungsi Preservasi.** Fungsi preservasi koleksi sebagai upaya pelestarian dan pengawetan bahan pustaka adalah fungsi melindungi, untuk melindungi bahan pustaka supaya terjaga kelestariaannya sehingga dapat digunakan lebih lama. Terdapat sejumlah potensi yang bisa dilakukan Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan di era TIK saat ini, yaitu:

- **Pelestarian naskah kuno dan ephemera.** Kegiatan pelestarian (preservasi) bahan perpustakaan adalah hal yang memiliki tingkat urgensi tinggi dari sebuah perpustakaan. Hal tersebut dikarenakan objeknya adalah koleksi dan akses pada perpustakaan. Seiring dengan perkembangan teknologi, ledakan informasi dan cara pengelolaan yang lebih efisien, preservasi mengalami transformasi

tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip dasar tentang memperpanjang umur, menentukan pilihan, kualitas, integritas dan akses melainkan lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan pemakai dan memberi peran sosial kepada masyarakat. Perpustakaan Nasional dalam melestarikan warisan budaya bangsa dalam bentuk analog maupun nilai informasinya terhitung paling besar hasilnya dibandingkan lembaga pelestarian yang lain di Indonesia, namun masih terhitung kecil jumlahnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil kajian terhadap resiko kerusakan koleksi layanan dan deposit menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara hasil preservasi dengan beban koleksi yang membutuhkan penanganan preservasi.

Preservasi bahan pustaka telah melebar dari sekedar koleksi cetak, ke koleksi lainnya, bahkan sampai mumi pun juga menjadi bagian dari preservasi perpustakaan. Peningkatan fasilitas preservasi dan peningkatan kualitas tenaga perpustakaan yang mampu mengelola preservasi koleksi perpustakaan sangat dibutuhkan saat ini dan di masa mendatang. Tidak saja karena koleksi tersebut sangat berharga, tetapi juga karena warisan budaya perlu dilestarikan sehingga mereka bisa tetap dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Kegiatan preservasi juga melibatkan sebuah kegiatan diseminasi informasi. Koleksi yang dipreservasi seringkali tidak terlihat atau memang tidak di-*display*, sehingga hal ini tidak memberikan peluang kepada pemustaka untuk mengenali karya-karya anak bangsa. Itulah sebabnya, diseminasi informasi dan karya lainnya perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan warisan budaya bangsa. Diseminasi dapat dilakukan baik menggunakan media secara fisik, maupun melalui dunia digital. menunjukkan keberadaan koleksi langka dan koleksi lain yang didiseminasi secara fisik akan menarik perhatian banyak orang karena koleksi tersebut secara langsung dapat dilihat. Namun demikian, karena semakin banyak orang tinggal dan berkunjung di dunia maya, maka koleksi informasi tersebut juga perlu dipromosikan melalui media sosial.

- **Digitalisasi.** Teknologi digital membuat kemudahan dalam pengorganisasian sumber-sumber informasi dan pengetahuan. Koleksi ephemeral merupakan koleksi yang hanya berlaku

sementara sehingga aksesibilitasnya terbatas dalam periode tertentu. Perpustakaan Nasional sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam perlu mengadopsi digitalisasi dengan sebagai sasaran utamanya adalah koleksi ephemeral. Ketika materi asli yang terancam punah didigitalkan, formulir yang dikonversi memperoleh status master pelestarian yang dalam kasus ekstrim, harus berfungsi sebagai pengganti untuk dokumen asli yang hilang. Dalam hal ini, tentu saja, kualitas reproduksi harus lebih tinggi daripada yang diperlukan dalam kasus-kasus di mana bentuk sekunder digital hanya ada untuk meningkatkan akses yang mungkin standar. Informasi digital tidak tergantung dari media yang merekamnya dan dapat disimpan dengan redundansi tertentu yang memungkinkan rekonstruksi penuh dan tepat bahkan ketika media telah sebagian rusak. Ada beberapa keuntungan dengan format digital, antara lain: i) membuat sumber daya lebih mudah diakses secara *online* untuk penelitian jarak jauh; ii) akses yang lebih baik dan kemudahan penggunaan untuk komunitas dan sekitarnya; iii) memberikan akses lebih mudah ke informasi; dan (iv) memperluas akses ke sumber daya yang rentan dan ke sumber daya yang sulit diakses.

4. **Fungsi Layanan.** Fungsi layanan perpustakaan adalah fungsi utama dari sebuah perpustakaan. Fungsi layanan perpustakaan mencakup memberikan layanan informasi bagi anggota masyarakat yang memerlukan informasi. Informasi yang diminta dapat berupa informasi mengenai tugas sehari-hari, pelajaran maupun informasi lainnya. Selain itu perpustakaan juga wajib melayani pemustaka sebagai sarana pendidikan nonformal dan informal, artinya perpustakaan merupakan tempat belajar diluar bangku sekolah maupun juga tempat belajar dalam lingkungan pendidikan sekolah. Dalam hal ini, yang berkaitan dengan pendidikan nonformal ialah perpustakaan umum, sedangkan yang berkaitan dengan pendidikan informal ialah perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi. Untuk itu fungsi layanan di perpustakaan akan dijalankan bukan hanya oleh Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, namun juga oleh unit lain seperti Direktorat Standardisasi

dan Akreditasi, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pembinaan Pustakawan serta Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca. Sejumlah kegiatan yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Digital curation.** Perkembangan terbaru dalam sumber-sumber informasi adalah adanya media digital sebagai media penyimpanan. Di sisi lain, perpustakaan memiliki dua macam sumber informasi digital, yaitu pertama, *born-digital*, dimana sumber informasi memang lahir dalam bentuk digital, sehingga dibutuhkan model-model kurasi yang langsung digital. Kedua, koleksi dalam bentuk cetak (*printed*) dapat dialihmediakan menjadi digital atau (*digital surrogates*). Namun perlu diperhatikan bahwa baik *born digital* maupun *digital surrogate* juga perlu dipreservasi agar sumber-sumber informasi tersebut terus dapat dimanfaatkan dalam waktu yang panjang.
- **Digital resources production.** Hal baru dalam dunia perpustakaan adalah perpustakaan sebagai tempat memproduksi informasi dalam bentuk digital. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi, maka produksi informasi menjadi meningkat secara eksponensial. Hal ini terjadi di dalam berbagai sektor. Perpustakaan juga dapat ikut ambil bagian untuk menghasilkan produksi informasi dan pengetahuan, dengan menyediakan fasilitas *information production house*. *Unit information production* ini akan menambah informasi, pengetahuan, budaya dan seni hasil dari produksi di perpustakaan dengan membangun produksi informasi, yang pada dasarnya perpustakaan telah turut ambil bagian dalam melestarikan sumber-sumber informasi dan budaya bangsa Indonesia.
- **Layanan data penelitian.** Manajemen data penelitian menjadi isu yang hangat saat ini. Isu ini berkaitan erat dengan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, adalah:
 - *Research Data.* Perpustakaan Nasional perlu membangun koleksi data baik dalam bidang perpustakaan, maupun nantinya juga dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu yang terus berkembang dengan pesat. Data hasil penelitian memiliki peran

yang penting juga sebagai dasar pengembangan keilmuan maupun pengetahuan.

- *Laporan Penelitian.* Hal pertama yang mungkin dapat dilakukan dalam *research reports* adalah mengadakan kerjasama dengan semua program studi bidang perpustakaan dan informasi di seluruh Indonesia, khususnya Strata 2 dan 3. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta naskah tesis dalam bidang perpustakaan lengkap dengan datanya dapat disimpan di Perpustakaan Nasional dan kemudian naskah tersebut dapat dilayankan kepada pemustaka yang sedang menulis tesis atau pun disertasi, bahkan juga masyarakat umum dapat mengakses karya-karya dalam bidang perpustakaan dan informasi dari seluruh program studi yang ada di Indonesia.
- *Analisis Data Hasil Penelitian.* Perpustakaan Nasional perlu mengembangkan analisis hasil-hasil penelitian baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk diskusi dan presentasi. Analisis hasil penelitian ini dapat memacu para pustakawan untuk melakukan penelitian juga, atau pun memanfaatkan hasil penelitian tersebut sebagai bahan awal untuk penelitian yang akan mereka lakukan.

5. **Fungsi Jejaring.** Pengembangan jejaring internasional melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai bentuk perjanjian untuk melaksanakan berbagai kegiatan secara bersama. MoU direalisasi antara Perpustakaan Nasional dan perpustakaan-perpustakaan yang telah melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama. Fungsi Ini akan lebih banyak dijalankan oleh Sekretariat Utama melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Pusat Data dan Informasi, serta Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara melalui:

- ***International partnership.*** Kerja sama internasional perlu dikembangkan dengan berbagai kegiatan yang mendorong adanya kolaborasi antar perpustakaan nasional. Hal ini akan menguatkan posisi Perpustakaan Nasional di mata dunia sehingga Perpustakaan Nasional dapat mengembangkan berbagai kegiatan kerja sama

untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang bergerak dalam bidang kepustakawanan.

- ***International events.*** Penyelenggaraan kegiatan internasional di wilayah Indonesia baik diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional maupun oleh asosiasi internasional perpustakaan seperti IFLA, akan memberikan penguatan yang sangat berarti bagi para pustakawan Indonesia. Dengan kegiatan seperti itu, pustakawan Indonesia akan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan bertaraf internasional, tetapi dengan biaya yang tidak terlalu mahal karena diselenggarakan di negaranya sendiri. Di sisi lain dengan menyelenggarakan *events* internasional di Indonesia, maka Indonesia akan banyak mendapatkan perhatian dari pihak internasional.
- ***Standard of World-class Libraries.*** Perlunya melihat perkembangan baru dalam dunia perpustakaan dan menyetarakan standar perpustakaan, khususnya Perpustakaan Nasional, sehingga memiliki kualitas yang bertaraf internasional. Perpustakaan dalam jaringan (*networked libraries*) merupakan salah satu standar yang penting dalam *world-class*. Merealisasi Indonesia OneSearch (IOS) sebagai basis dari jaringan perpustakaan di Indonesia akan menjadikan masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap perpustakaan. Hal ini dapat dimulai dengan membangun jaringan perpustakaan se-Jabodetabek dan dimulai dengan pinjam antar perpustakaan, bukan pinjam dimanapun, kembalikan dimanapun seperti yang sudah dilakukan oleh Singapura. Di sisi lain, kita perlu menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai *landmark* di Jakarta, bukannya Monumen Nasional yang menjadi *background* dari setiap foto yang diambil dari Perpustakaan Nasional.

6. **Fungsi Pembinaan.** Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan perpustakaan seluruh jenis perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan Nasional mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dengan melakukan pengembangan perpustakaan. Bradley (2002) mengusulkan skema

baru perpustakaan nasional untuk abad ke-21, yang mendefinisikan peran daripada fungsi, karena mereka memosisikan ulang dan menegaskan kembali pentingnya mereka untuk era digital melalui dukungan untuk pengembangan perpustakaan guna mendukung ekonomi serta sebagai tempat untuk pendidikan dan pembelajaran seumur hidup serta pengembangan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Perpustakaan Nasional melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, Pusat Pembinaan Pustakawan, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai potensi besar untuk membina perpustakaan di Indonesia, melalui:

- **Pengembangan Perpustakaan Berstandar Nasional.** Saat ini jumlah perpustakaan di Indonesia 164.610 perpustakaan baru hanya 1% yang terakreditasi, sementara itu jumlah perpustakaan yang belum terakreditasi saat ini masih sekitar 99% sehingga masih banyak perpustakaan yang belum sesuai standar nasional. Standar nasional perpustakaan saat ini mencakup infrastruktur bangunan, teknologi informasi serta sumber daya manusia.
- **Transformasi Layanan Berbasis Inklusi Sosial (SDGs).** Fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*), demokratis, berkeadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Selaras dengan amanah UNESCO SDGs 2015 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) menyebutkan sebagai berikut:



Gambar 1.3.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 17 butir berikut: 1) pengentasan kemiskinan; 2) tidak adanya kelaparan; 3) kesehatan dan kesejahteraan yang baik; 4) pendidikan berkualitas; 5) kesetaraan gender; 6) air bersih dan sanitasi; 7) energi bersih dan terjangkau; 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) industri, inovasi dan infrastruktur; 10) mengurangi kesenjangan; 11) kota dan komunitas berkelanjutan; 12) konsumsi dan produksi yang dapat dipertanggungjawabkan; 13) mengenai perubahan iklim; 14) pemeliharaan sumber daya laut; 15) pemeliharaan sumber daya darat; 16) kedamaian, keadilan dan lembaga yang efektif institusi yang kuat; 17) kerja sama global untuk mencapai tujuan. Program SDG's yang diamanahkan PBB sangat sesuai dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah sebuah program dimana perpustakaan bisa digunakan oleh siapa saja tanpa mengenal gender, agama, suku, ras.

Program ini mengembangkan fungsi perpustakaan menjadi ranah publik sebagai ruang untuk berbagi pengalaman, belajar kontekstual dan berlatih keterampilan hidup. Untuk mendukung program transformasi perpustakaan, kinerja layanan perpustakaan harus meningkat dengan meningkatkan kecukupan dan ketersediaan sumber daya perpustakaan dan layanan. Penyediaan sarana aksesibilitas dengan menyediakan infrastuktur internet/digital, kecepatan layanan perpustakaan juga harus

dilakukan sehingga pemanfaatan koleksi bisa terlihat dan kunjungan pemustaka perkapita.

- **Pengembangan SDM Perpustakaan.** Perbandingan antara jumlah perpustakaan dan jumlah pustakawan dan tenaga perpustakaan di Indonesia sangat jauh sehingga perlu pengembangan dari segi kualitas dan kuantitas.

1.3.2 Permasalahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas: *(i)* melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; *(ii)* memajukan kesejahteraan umum; *(iii)* mencerdaskan kehidupan bangsa; dan *(iv)* ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perpustakaan di Indonesia adalah terkait rendahnya literasi bangsa Indonesia. adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Ketercukupan Koleksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 3 menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan. Terkait dengan kepentingan pengembangan koleksi perpustakaan, pasal tersebut menegaskan kepentingan pengembangan koleksi bahan perpustakaan lingkup nasional, deposit karya cetak dan karya rekam, pelestarian dan penelitian bahan perpustakaan, termasuk naskah nusantara sebagai warisan dokumenter bangsa.

Salah satu peran Perpustakaan Nasional yang amat penting dalam mengembangkan koleksi nasional dan melestarikan hasil budaya bangsa adalah kegiatan pengelolaan deposit terbitan nasional dalam rangka

menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan koleksi nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam terhadap penerbit, pengusaha rekaman, warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri, orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia untuk menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah, atau Badan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

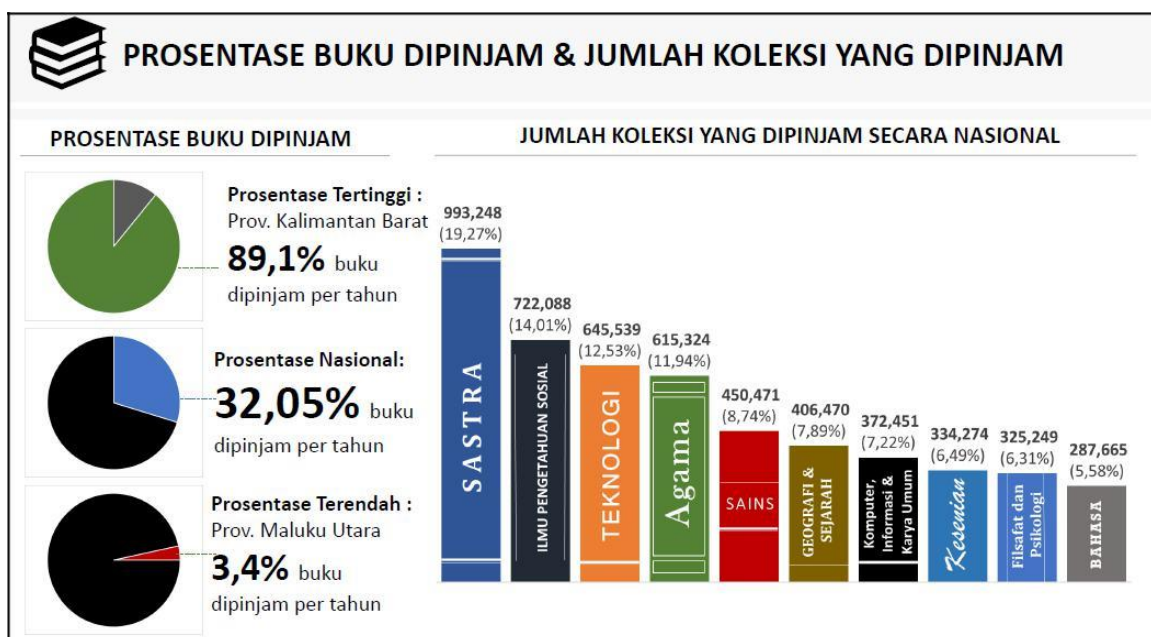
Tanggung jawab Perpustakaan Nasional dalam mengembangkan koleksi nasional dan melestarikan hasil budaya bangsa, salah satu jenis bahan perpustakaan ialah naskah nusantara. Naskah nusantara adalah warisan dokumenter bangsa yang bersifat unik, karena ditulis tangan dengan menggunakan media, aksara dan bahasa tradisional atau daerah. Naskah nusantara termasuk dalam benda cagar budaya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, naskah masuk dalam lingkup aspek Pelindungan (Pasal 56 s.d. Pasal 77), aspek Pengembangan (Pasal 78 s.d. Pasal 84), aspek Pemanfaatan (Pasal 85 s.d. 94), serta aspek Pengawasan dan Penyidikan (Pasal 99 dan Pasal 100).

Sensus juga menganalisa ketercukupan koleksi perpustakaan umum daerah di Indonesia. Berdasarkan IFLA/UNESCO, jumlah koleksi dikatakan mencukupi apabila setiap 1 (satu) orang penduduk membaca 2 (dua) koleksi. Sehingga dihitung rasio ketercukupan koleksi perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO dengan rumusan jumlah koleksi dibagi 2 (dua) kali jumlah penduduk. Jumlah koleksi secara nasional tercatat sebanyak 16.077.296 koleksi sehingga rasio ketercukupan koleksi perpustakaan sebesar 0,06213, maka dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan IFLA/UNESCO rasio ketercukupan jumlah koleksi perpustakaan kurang mencukupi. Berdasarkan provinsinya, rasio ketercukupan jumlah koleksi perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO yang tertinggi, yaitu terdapat pada Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan yang terendah, yaitu terdapat pada Provinsi Papua Barat. Tingkat ketercukupan koleksi dan jumlah koleksi yang dimiliki dirinci berdasarkan 10 kelas subjek koleksi ditunjukkan dalam infografis berikut:



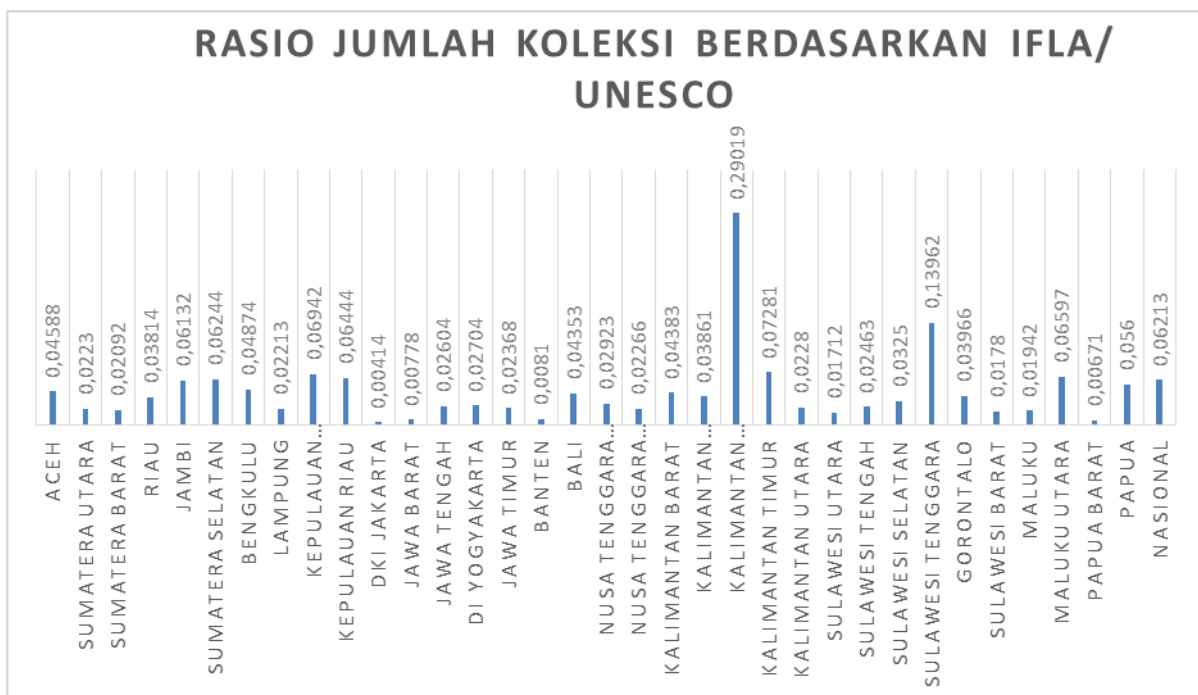
Gambar 1.3.2.1 Infografis Tingkat Ketercukupan Koleksi dan Jumlah Koleksi Yang Dimiliki

Selanjutnya terkait dengan pemanfaatan koleksi diketahui bahwa persentase jumlah koleksi buku yang dipinjam secara nasional sebesar 32,05%. Tiga subjek koleksi tertinggi yang banyak dipinjam adalah: Sastra, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Teknologi. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan provinsi, persentase jumlah koleksi buku yang dipinjam tertinggi yaitu pada Provinsi Kalimantan Barat (89,1%) sedangkan provinsi dengan persentase jumlah koleksi yang dipinjam paling sedikit yaitu pada Provinsi Maluku Utara (3,4%).



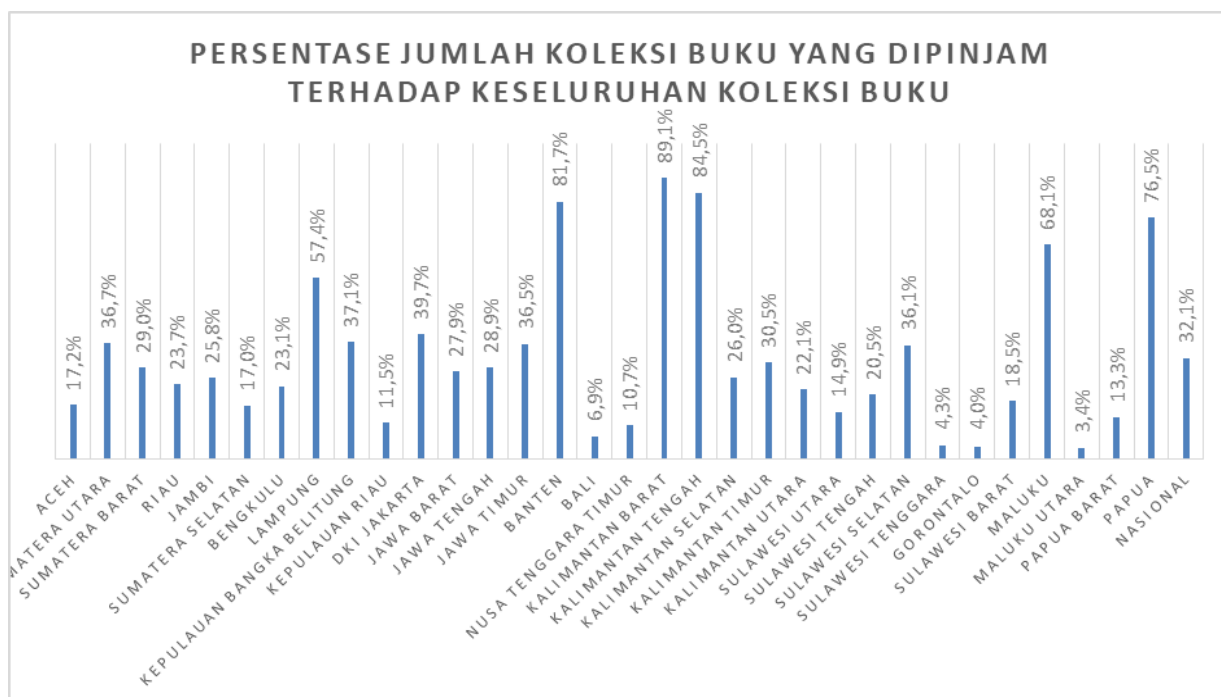
Gambar 1.3.2.2. Infografis Prosentase Buku/Koleksi Yang Dipinjam

Sensus juga menganalisa ketercukupan koleksi perpustakaan umum daerah di Indonesia. Berdasarkan IFLA/UNESCO, jumlah koleksi dikatakan mencukupi apabila setiap 1 orang penduduk membaca 2 koleksi. Sehingga dihitung rasio ketercukupan koleksi perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO dengan rumusan jumlah koleksi dibagi 2 (dua) kali jumlah penduduk. Secara nasional, rasio ketercukupan koleksi perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO sebesar 0,06213, sehingga dapat dikatakan bahwa rasio ketercukupan jumlah koleksi perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO kurang mencukupi. Berdasarkan provinsinya, rasio ketercukupan jumlah koleksi perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO yang tertinggi, yaitu terdapat pada Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan yang terendah, yaitu terdapat pada Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Papua Barat.



Grafik 1.3.2.1 Rasio Ketercukupan Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan Kategori Dari IFLA/Unesco pada 34 Provinsi Di Indonesia Dan Secara Nasional

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa sebanyak 100% wilayah di Indonesia kurang memenuhi ketercukupan jumlah koleksi menurut kriteria penilaian dari IFLA/UNESCO.



Grafik 1.3.2.2. Persentase Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam Terhadap Keseluruhan Koleksi Buku pada 34 Provinsi di Indonesia dan Secara Nasional

Selanjutnya terkait dengan pemanfaatan koleksi diketahui bahwa persentase jumlah koleksi buku yang dipinjam secara nasional sebesar 32,05%. Persentase jumlah koleksi buku yang dipinjam tertinggi, yaitu pada Provinsi Kalimantan Barat (89,1%), Provinsi Kalimantan Tengah (84,5%), dan Provinsi Banten (81,7%), sedangkan provinsi dengan persentase jumlah koleksi yang dipinjam paling sedikit, yaitu pada Provinsi Maluku Utara (3,4%), Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing 4,0% dan 4,3%.

Selanjutnya apabila dilakukan kajian mengenai kecukupan jumlah koleksi perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk diperoleh rasio-rasio sebagai berikut:

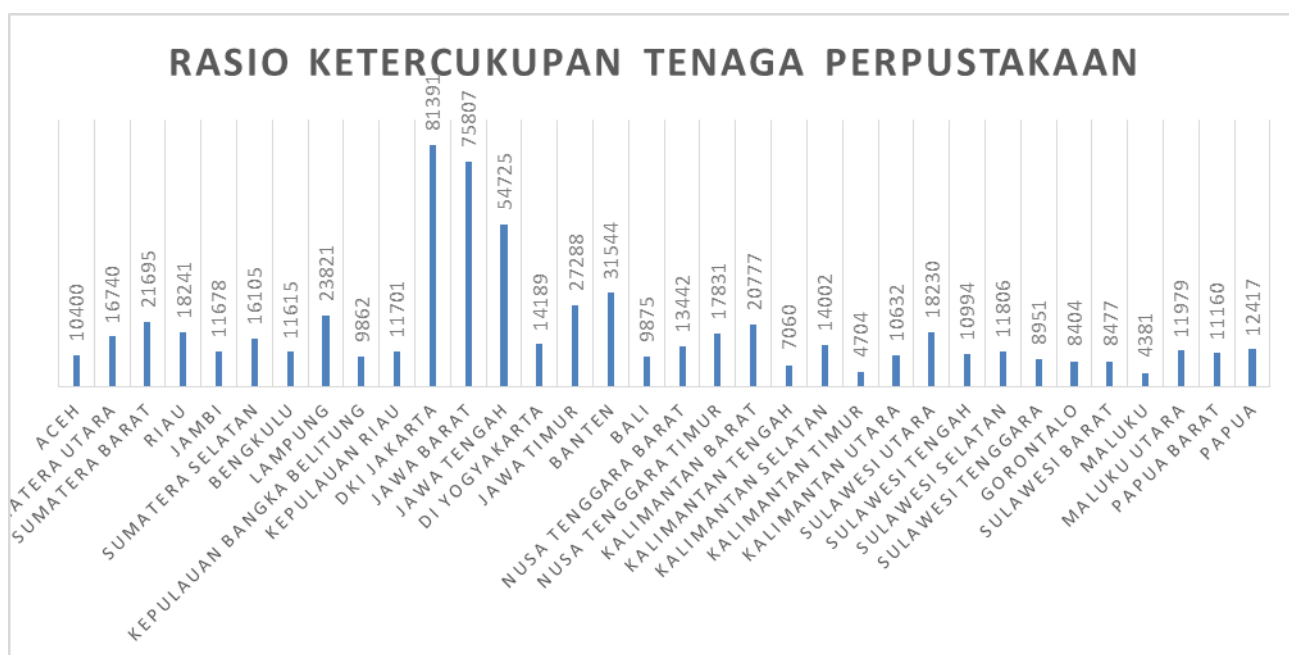
Tabel 1.3.2.1. Rasio jumlah koleksi dibandingkan dengan jumlah penduduk

Rasio Jumlah Koleksi Berdasarkan IFLA/ UNESCO <i>(Jumlah koleksi dibagi 2x jumlah penduduk)</i>	0,06213
Persentase koleksi buku yang dipinjam	32.05%

Rasio ketercukupan jumlah koleksi dinilai menggunakan kriteria dari IFLA/UNESCO, dikatakan bahwa jumlah koleksi masih kurang (rasio jumlah koleksi berdasarkan IFLA/UNESCO diperoleh nilai 0,06213, dikatakan memenuhi jika ≥ 2).

b. Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

Tenaga perpustakaan adalah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Menurut standar IFLA, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum adalah 1 : 2.500, artinya maksimal 1 orang tenaga perpustakaan melayani 2.500 orang penduduk. Berikut ini adalah rasio ketercukupan tenaga perpustakaan yang diperoleh dari jumlah penduduk dibagi jumlah perpustakaan yang ada.

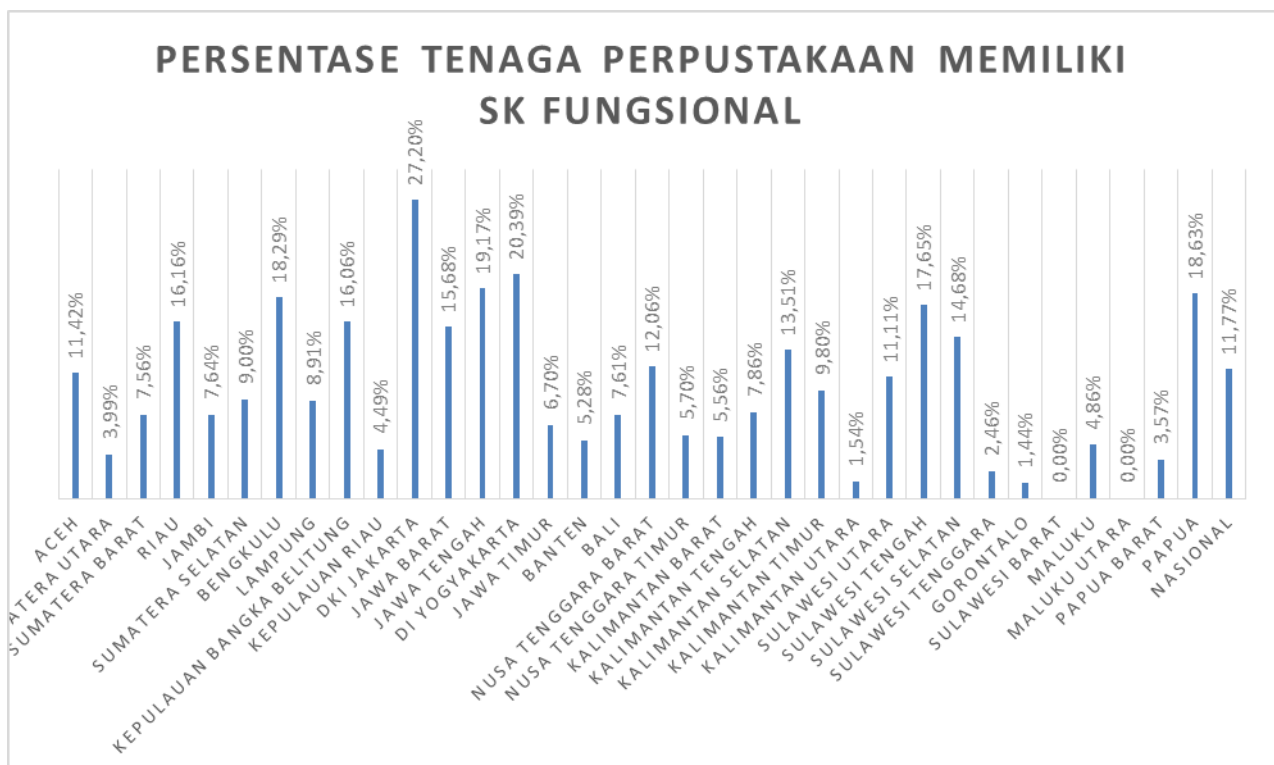


Grafik 1.3.2.3 Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

Berdasarkan hasil sensus diketahui bahwa secara nasional 1 tenaga perpustakaan melayani 21.668 penduduk, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga perpustakaan belum mencukupi. Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa pada Provinsi DKI Jakarta 1 tenaga perpustakaan

harus melayani 81.391 orang penduduk. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang harus dilayani oleh 1 orang tenaga perpustakaan. Apabila nilai rasionya ≥ 2.500 atau 1 tenaga perpustakaan melayani lebih dari 2.500 penduduk maka kondisinya dikatakan tidak ideal. Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa tidak ada satupun yang mencapai kondisi ideal dalam hal ketercukupan tenaga perpustakaan.

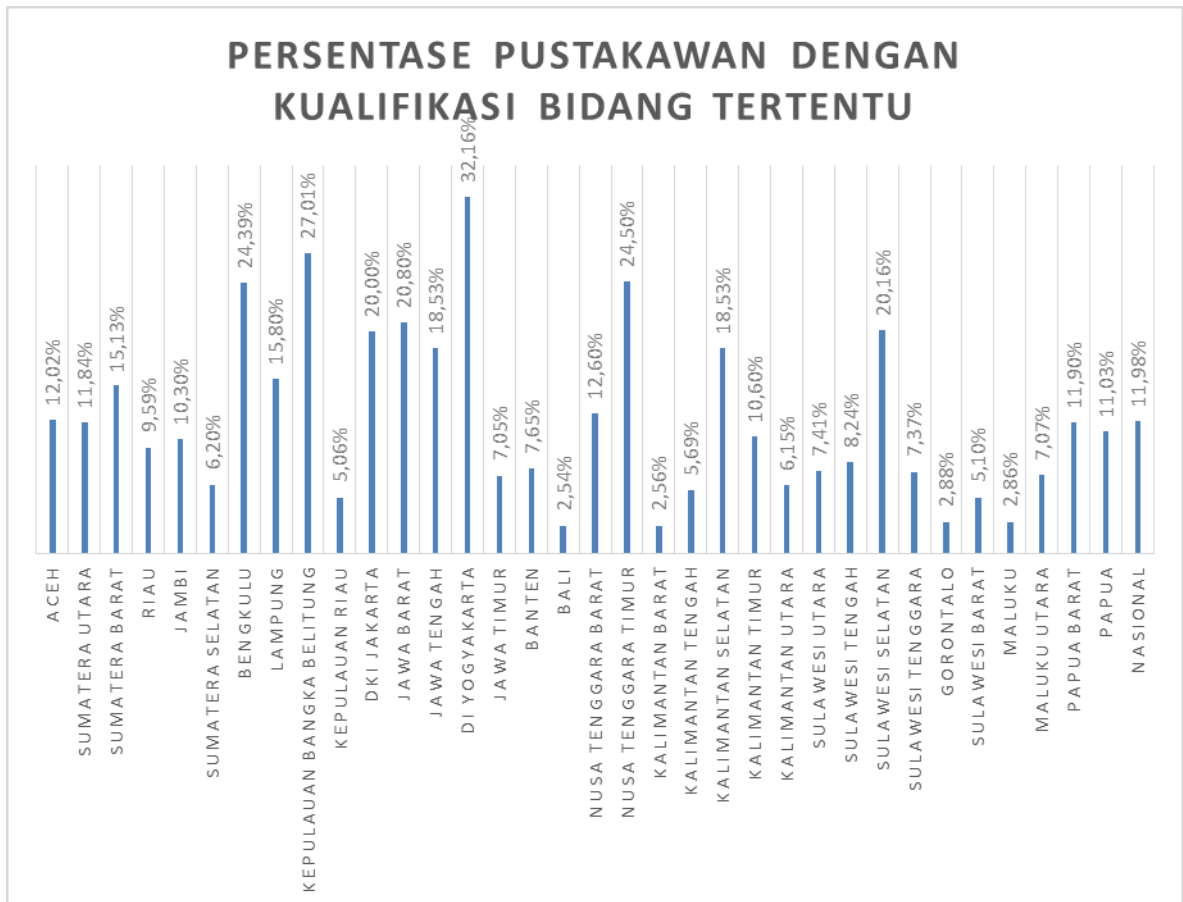
Berdasarkan grafik persentase jumlah tenaga pustakawan yang memiliki SK jabatan fungsional pustakawan di bawah ini, diketahui bahwa provinsi yang mempunyai pustakawan dengan SK jabatan fungsional pustakawan tertinggi, yaitu DKI Jakarta, dengan nilai persentase sebesar 27,20%. Sedangkan, provinsi yang mempunyai tenaga pustakawan dengan SK jabatan fungsional pustakawan paling sedikit, yaitu pada Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Barat (0%).



Grafik 1.3.2.4 Persentase Tenaga Perpustakaan yang Memiliki SK Jabatan Fungsional Pustakawan

Selanjutnya akan dibahas mengenai jumlah tenaga pustakawan yang mempunyai kualifikasi bidang perpustakaan, informasi dan dokumentasi. Berdasarkan grafik persentase jumlah tenaga pustakawan yang memiliki kualifikasi bidang ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi dibawah ini, diketahui bahwa provinsi yang mempunyai pustakawan dengan

kualifikasi bidang tertentu yang tertinggi, yaitu terdapat pada Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Bengkulu, yaitu dengan nilai persentase masing-masing wilayah sebesar 32,16%, 27,01%, dan 24,39%. Sedangkan, provinsi yang mempunyai tenaga pustakawan dengan bidang ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi yang paling sedikit, yaitu pada Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Maluku, yaitu dengan persentase pustakawan yang memiliki kualifikasi bidang ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi sebanyak kurang dari 3%).



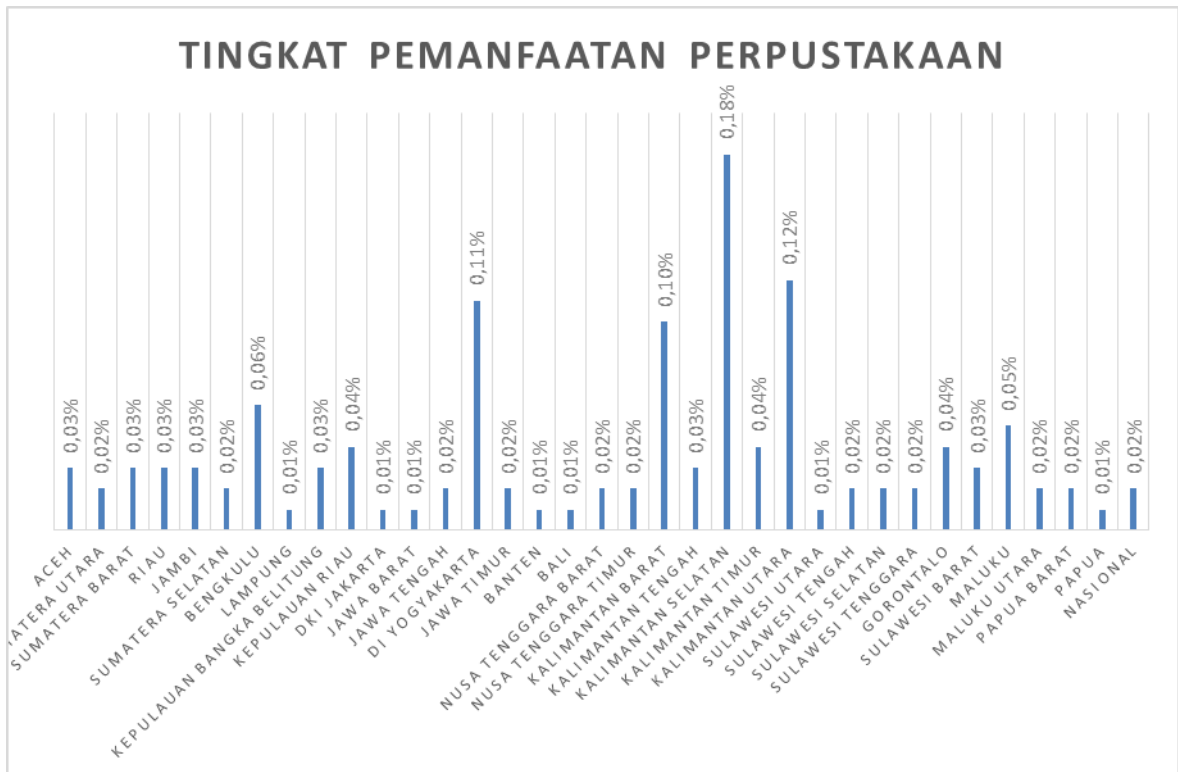
Grafik 1.3.2.5 Persentase Tenaga Perpustakaan yang Memiliki Kualifikasi Bidang Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi

c. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan/Pemustaka

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 255.461.700 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,38% per tahun. Saat ini terdapat penduduk produktif, atau di atas usia 15 tahun, sebesar 186.100.917 jiwa, dengan jumlah usia sekolah sebesar 16.734.903 jiwa. Sementara itu, Produk Domestik Bruto sebesar 1.154 triliun rupiah, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8% per tahun. Dari segi demografi, wilayah Indonesia lebih banyak didominasi oleh

lautan dengan 17.504 pulau. Dari total 82.190 desa/kelurahan di Indonesia terdapat sejumlah 12.827 desa/kelurahan berada di tepi laut dan perairan.

Berdasarkan kondisi kependudukan di atas, perpustakaan memiliki prospek yang sangat menggembirakan untuk dikembangkan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, di sisi lain kondisi pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat saat ini terhitung rendah.



Grafik 1.3.2.6 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan

Kunjungan pemustaka dapat mencerminkan tingkat pemanfaatan perpustakaan. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dapat dilihat berdasarkan jumlah kunjungan pemustaka per hari dibagi dengan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil sensus diketahui bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan di Indonesia baru sebesar 0,02%. Jumlah ini belum dikatakan ideal, karena idealnya berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, jumlah kunjungan ke perpustakaan umum tiap hari adalah 2% dari jumlah penduduk di suatu wilayah. Selanjutnya berdasarkan grafik tingkat pemanfaatan perpustakaan dibawah ini, diketahui bahwa 5 (lima) provinsi yang mempunyai tingkat pemanfaatan perpustakaan tertinggi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan (0,18%), Provinsi Kalimantan Utara (0,12%), Provinsi DI Yogyakarta (0,11%), Provinsi Kalimantan Barat

(0,10%), dan Provinsi Bengkulu (0.06%). Sedangkan untuk provinsi lainnya mempunyai tingkat pemanfaatan perpustakaan dibawah 0,05%.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

2.1 Visi

Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Visi Presiden periode 2020-2024, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”.

2.2 Misi

Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 ***revolusi mental dan pembangunan kebudayaan***. Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi:

“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.

2.3 Tujuan Pembangunan Perpustakaan Nasional

Upaya mewujudkan agenda pembangunan nasional maka tujuan pembangunan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan misi adalah:

“Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024”.

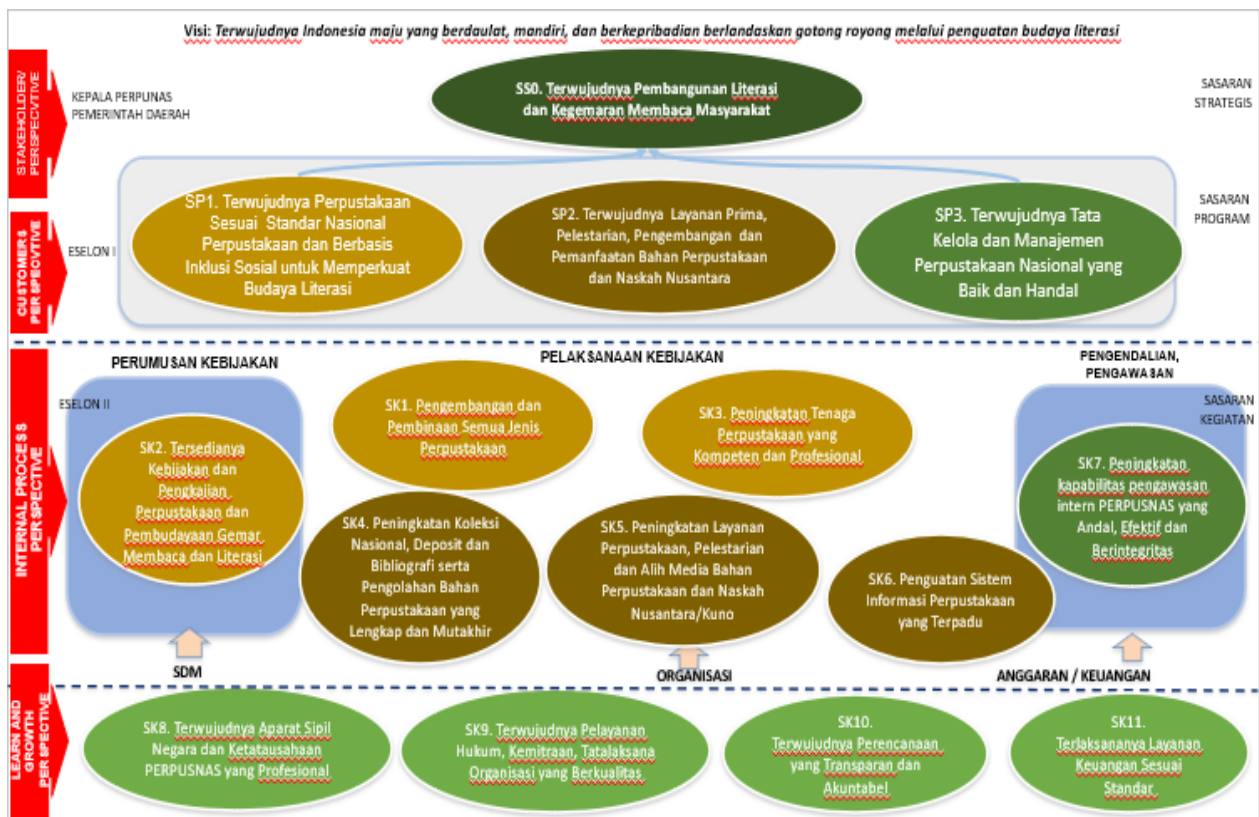
2.4 Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional

Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 diformulasikan dari misi dan tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai *outcome* atau dampak, yaitu:

“Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca”, dengan indikator:

- Nilai kegemaran membaca dari 53.84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024.
- Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

2.5. Peta Strategis Perpustakaan Nasional



Gambar 2.5.1 Peta Strategis Perpustakaan Nasional

Sasaran Strategis (SS):

SS. Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat:

Indikator Kinerja:

IKU1. Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat dari 53.84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024

IKU2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,0 tahun 2024.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional, maka yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan, literasi dan pembudayaan kegemaran membaca adalah agenda ke-4 (empat), yaitu **“Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”** dengan sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerjasama antar warga, mencakup: pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa.
2. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter, melalui:
 - a. Peningkatan budaya literasi, mencakup: (i) pengembangan budaya gemar membaca; (ii) pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi; (iii) peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - b. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi, mencakup: (i) pengembangan mitra perpustakaan (*library supporter*); (ii) pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Perpustakaan Nasional

Adapun arah kebijakan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial

bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter, melalui:

- a. Pengembangan dan pembinaan perpustakaan melalui akreditasi dan standarisasi semua jenis perpustakaan, modernisasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, penguatan perpustakaan melalui bantuan bahan perpustakaan dan layanan perpustakaan bergerak melalui mobil perpustakaan keliling digital dan motor perpustakaan keliling.
 - b. Implementasi kebijakan dan pengkajian perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi melalui gerakan sosial literasi, penguatan *influencer* literasi baik duta baca, tokoh masyarakat dan agama serta *public figure*;
 - c. Peningkatan tenaga perpustakaan dan pegiat literasi yang kompeten sebagai pengelolaan perpustakaan dan pendamping literasi;
 - d. Penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu, dan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan jejaring nasional perpustakaan.
2. Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara bagi terwujudnya pemajuan kebudayaan untuk memperteguh jati diri bangsa, melalui:
- a. Peningkatan koleksi nasional, deposit dan bibliografi serta pengolahan bahan perpustakaan yang lengkap dan mutakhir;
 - b. Peningkatan pelestarian dan alih media bahan perpustakaan dan naskah nusantara/kuno.
3. Peningkatan tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional RI yang baik dan andal, melalui:
- a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern Perpustakaan Nasional yang andal, efektif dan berintegritas;
 - b. Terwujudnya pelayanan hukum, kemitraan, tata laksana organisasi yang berkualitas;
 - c. Terwujudnya Aparat Sipil Negara dan ketatausahaan Perpustakaan Nasional yang profesional;
 - d. Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

3.3 Program dan Target Kinerja

Perpustakaan Nasional memiliki dua program yaitu program teknis yaitu program substansi di bidang perpustakaan dan program generik yaitu program dukungan dalam pencapaian substansi bidang perpustakaan. Adapun program teknis disebut dengan program perpustakaan dan literasi dan program generik disebut dengan program dukungan manajemen.

1. Program Perpustakaan dan Literasi

Program ini merupakan program teknis yang menjadi tanggungjawab Perpustakaan Nasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan sasaran program dan indikator serta target, sebagai berikut:

Sasaran Program 1 Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi.

- Indikator
- Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk, dengan target 1:16 tahun 2020 menjadi 1:12 tahun 2024.
 - Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, dengan target 1:20.000 tahun 2020 menjadi 1:16.000 tahun 2024.
 - Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar, dengan target 19,48% tahun 2020 menjadi 23,36% tahun 2024.
 - Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat, dengan target 1,00% tahun 2020 menjadi 2,00% tahun 2024.

Sasaran Program 2 Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara.

- Indikator
- Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, dengan target 75,5 tahun 2020 menjadi 85,0 tahun 2024.
 - Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan di PERPUSNAS, dengan target 0,5% tahun 2020 menjadi 2,5% tahun 2024.

- Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Menjadi Koleksi Nasional, dengan target 5% setiap tahunnya.
- Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno, dengan target 18,43% tahun 2020 menjadi 22,57% tahun 2024.

Sedangkan kegiatan utama dalam mendukung Program Perpustakaan dan Literasi, sebagai berikut:

- a) Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara;
- b) Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan;
- c) Pembinaan Pustakawan;
- d) Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan;
- e) Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan;
- f) Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
- g) Pengelolaan Data dan Informasi;
- h) Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan;
- i) Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus;
- j) Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi;
- k) Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca dan Literasi;
- l) Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno; dan
- m) Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik yang merupakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional, dengan sasaran program, dan indikator serta target, sebagai berikut:

Sasaran Program Terwujudnya tata kelola dan manajemen

Perpustakaan Nasional yang baik dan handal.

Indikator

- Indeks Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional RI dengan target 75 tahun 2020 menjadi 95 tahun 2024.
- Indeks SPBE, dengan target 3,06 tahun 2020 menjadi 3,62 Tahun 2024.
- Opini BPK atas Laporan Keuangan Perpustakaan

Nasional dengan target opini WTP tahun 2020 dan juga WTP tahun 2024.

- Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan target 3,7 tahun 2020 menjadi 4,1 tahun 2024.

Sedangkan kegiatan utama dalam mendukung program dukungan manajemen Perpustakaan Nasional, sebagai berikut:

- a) Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional;
- b) Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional;
- c) Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional;
- d) Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional;
- e) Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno; dan
- f) Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Perpustakaan Nasional, diusulkan Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas Perpustakaan Nasional maupun yang terkait dengan bidang tugas Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Disamping itu, dalam memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakaan Nasional perlu didukung oleh regulasi yang memadai yang dapat diimplementasikan sampai unit perpustakaan terkecil di masyarakat, dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang dan Peraturan Perpustakaan Nasional. Rincian Peraturan Perundang-undangan bidang tugas perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Amandemen Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
3. Peraturan Perpustakaan Nasional tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; dan
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan strategi Perpustakaan Nasional sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Perpustakaan Nasional harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, kelembagaan, dan sumber daya aparatur yang kompeten dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Perpustakaan Nasional secara efektif, efisien dan handal. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, Perpustakaan Nasional berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan di bidang perpustakaan serta kelanjutan dari Reformasi Birokrasi yang terus diupayakan perbaikan secara terus menerus dalam mewujudkan kelembagaan sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman. Prioritas kegiatan penguatan kelembagaan tahun 2020-2024 antara lain melalui:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan Perpustakaan Nasional dan mendorong penguatan kapasitas perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota.
2. Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi *outcome* yang didukung oleh tenaga fungsional perpustakaan dan fungsional lainnya.
3. Penguatan lembaga akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan.
4. Penyelarasan struktur organisasi dan tata kelola Perpustakaan Nasional.
5. Merevisi model standar operasional prosedur, menyederhanakan proses bisnis, dan mempercepat digitalisasi pengelolaan perpustakaan.
6. Menghargai peran dan kontribusi pegawai berprestasi dengan mengembangkan dan memberdayakan mereka untuk mendapatkan dan mengembangkan keahlian fungsional.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis

Target kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Perpustakaan Nasional merupakan kondisi yang akan dicapai dan diharapkan membawa pengaruh atau dampak (*outcome/impact*) bagi pencapaian tujuan pembangunan perpustakaan yaitu penguatan budaya literasi dilihat dari Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*), dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS: Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	55,3	59,3	63,3	67,3	71,3
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0

4.2 Target Kinerja Sasaran Program

Target kinerja Sasaran Program yang telah ditetapkan Perpustakaan Nasional RI merupakan kondisi yang akan dicapai dan diharapkan dalam mendukung keberhasilan target kinerja sasaran strategis yang membawa pengaruh atau dampak (*outcome/impact*) dalam mewujudkan pembangunan literasi masyarakat dan kegemaran membaca di lihat dari **Customers Perspective** dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 4.2.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Program Perpustakaan dan Literasi (*Customers Perspective*)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP1: Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1:16	1:15	1:14	1:13	1:12
	Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1 : 20.000	1 : 19.000	1 : 18.000	1 : 17.000	1 : 16.000
	Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	%	19,48	20,45	21,42	22,39	23,36
	Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
SP2: Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara	Kepatuhan Standard Pelayanan Publik	Indeks	75,5	78,5	80,0	82,0	85,0
	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan di PERPUSNAS	%	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
	Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Menjadi Koleksi Nasional	%	5	5	5	5	5
	Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah	%	18,43	18,43	19,79	21,18	22,57

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kuno						

Tabel 4.2.2 Target Kinerja Sasaran Strategis Program Dukungan Manajemen
(Customers Perspective)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP3: Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Perpustakaan Nasional Yang Baik dan Handal	Indeks Reformasi Birokrasi PERPUSNAS	Indeks	75	80	85	90	95
	Indeks SPBE	Indeks	3,06	3,20	3,34	3,48	3,62
	Opini BPK atas Laporan Keuangan PERPUSNAS	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1

4.3 Target Kinerja Sasaran Kegiatan

Target kinerja Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan Perpustakaan Nasional merupakan kondisi yang akan dicapai dan diharapkan dalam mendukung keberhasilan target kinerja sasaran program baik program perpustakaan dan literasi (program teknis) dan program dukungan manajemen (program generic). Target kinerja Sasaran Kegiatan yang membawa pengaruh berupa *output/outcome* terhadap pencapaian sasaran program dilihat dari **Internal Process Perspective**, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 4.3.1 Target Kinerja Sasaran Kegiatan

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK1: Pengembangan dan Pembinaan Semua Jenis Perpustakaan	Persentase perpustakaan umum yang dibina dan dikembangkan	%	3,77	3,77	3,53	4,29	4,06
	Persentase perpustakaan khusus yang dibina dan	%	3,05	3,05	5,34	7,02	9,92

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dikembangkan						
	Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	54.000	54.000	37.500	45.000	45.000
	Persentase perpustakaan Sekolah/Madrasah yang dibina dan dikembangkan	%	0,44	0,44	0,70	0,88	1,06
	Persentase perpustakaan Perguruan Tinggi yang dibina dan dikembangkan	%	5,88	5,88	6,47	7,12	7,83
SK2: Tersedianya Kebijakan dan Pengkajian Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi	Perpustakaan yang memenuhi standard	Perpustakaan	900	900	990	1.089	1.198
	NSPK bidang perpustakaan yang diterbitkan	Naskah	6	6	7	8	9
	Dokumen kajian perpustakaan, budaya baca, dan literasi	Dokumen	8	7	9	12	15
	Lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Lokasi	77	115	130	145	160
	Kegiatan pengembangan dan pembinaan kegemaran membaca dan literasi	Naskah	6	6	7	8	9
SK3: Peningkatan Tenaga Perpustakaan yang Kompeten dan Profesional	Jumlah tenaga perpustakaan yang memperoleh Diklat perpustakaan	Orang	638	1.100	1.715	1.886	2.035
	Tingkat kepuasan peserta DIKLAT	Nilai	90	91	92	93	94
	Persentase peningkatan tenaga perpustakaan yang profesional	%	17	22	27	32	37
	Persentase peningkatan tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	%	49	52	56	59	62
SK4: Peningkatan Koleksi Nasional,	Persentase peningkatan jumlah koleksi KCKR yang terhimpun	%	5	5	5	5	5

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Deposit dan Bibliografi serta Pengolahan Bahan Perpustakaan yang Lengkap dan Mutakhir	Persentase Penambahan Koleksi Nasional Perpustakaan yang Lengkap	%	5	6	7	8	9
	Persentase peningkatan layanan ISBN dan ISMN	%	5	5	5	5	5
	Persentase peningkatan penyusunan Literatur sekunder	%	5	5	5	5	5
	Persentase peningkatan Koleksi Perpustakaan Yang Diolah	%	10	10	10	10	10
SK5: Peningkatan Layanan Perpustakaan, Pelestarian dan Alih Media Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara/Kuno	Indeks pelayanan publik	Indeks	3,80	3,85	3,91	3,97	4,01
	Tingkat kepuasan pemustaka	Nilai	80	82	84	86	88
	Persentase peningkatan kunjungan pemustaka di Perpustakaan Nasional	%	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
	Persentase peningkatan alih aksara, alih bahasa dan penelitian naskah kuno	%	0,41	0,61	1,00	1,40	1,90
	Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Perpustakaan	%	8,67	9,53	10,07	10,77	11,47
	Persentase peningkatan Bahan Perpustakaan dialihmediakan	%	8,34	8,90	9,72	10,41	11,10
	Jumlah pemustaka Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Orang	293.974	1.000.000	1.300.000	1.500.000	2.000.000
	Tingkat kepuasan pemustaka Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Nilai	80	81	82	83	84
	Jumlah dokumen kajian dan kebijakan pengembangan layanan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Dokumen	3	3	3	3	3
	Jumlah pemustaka Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Orang	110.500	124.300	136.730	150.403	165.000

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tingkat kepuasan pemustaka Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Nilai	81	85	89	91	95
	Jumlah dokumen kajian dan kebijakan pengembangan layanan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Dokumen	1	2	3	3	3
SK6: Penguatan Sistem Informasi Perpustakaan yang terpadu	Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	%	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi	Nilai	75	75	78	81	84
	Persentase implementasi SMKI berbasis ISO27001	%	20	20	45	70	100
	Persentase Manajemen Layanan TIK berbasis ISO20000(IT Service Management system)	%	10	10	40	70	100
SK7: Terselenggaranya pengawasan internal Perpusnas yang efektif dan efisien	Tingkat maturitas SPIP PERPUSNAS	Nilai	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
SK8: Terwujudnya Aparat Sipil Negara dan Tata Usaha PERPUSNAS yang Profesional	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	75	78	80	82	85
	Nilai pengawasan kearsipan	Nilai	83	85	87	89	91
	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	3	3,25	3,5	3,75	4
	Indeks PBJ	Indeks	3	3,25	3,5	3,75	4
	Indeks Sistem Merit	Indeks	0.61	0,65	0,70	0,75	0,8
SK9: Terwujudnya Pelayanan Hukum, Kemitraan, Tatalaksana Organisasi yang berkualitas	Indeks Efektifitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perpustakaan	Indeks	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3
	Persentase Penyelesaian Kelembagaan Perpusnas	%	70	75	80	85	90
	Persentase opini negatif pemberitaan Perpustakaan Nasional pada media	Nilai	<10	<9	<8	<7	<6

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase peningkatan kerjasama di bidang perpustakaan	%	10	10	10	10	10
	Tingkat Efektivitas Implementasi SOP	Nilai	75	76	77	78	79
SK10: Terwujudnya Perencanaan yang Transparan dan Akuntabel	Nilai SAKIP PERPUSNAS	Nilai	71	74	77	80	83
	Nilai kinerja anggaran (SMART DJA)	Nilai	94	94,5	95	95,5	96
	Indeks Perencanaan	Indeks	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8
SK11: Terlaksananya Layanan Keuangan Sesuai Standar	Indeks Pengelolaan Keuangan	Indeks	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00

4.4 Kerangka Pendanaan

Dalam memenuhi target kinerja Perpustakaan Nasional sesuai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan program serta kegiatan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, Pendanaan pengembangan perpustakaan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan DAK), Pendanaan Perpustakaan Nasional akan memanfaatkan sebesar-besarnya alokasi anggaran yang bersumber dari APBN untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia dan untuk membangun budaya membaca masyarakat.

Tabel 4.4.1 Alokasi Anggaran Perpustakaan Nasional Berdasar Program

Kode	Program	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	PERPUSTAKAAN NASIONAL	454.777,2	650.139,8	869.353,8	948.070,9	1.037.186,6
057.DM	Program Perpustakaan dan Literasi	256.847,5	420.402,4	555.151,3	608.555,8	658.826,9
057.WA	Program Dukungan Manajemen	197.929,7	229.737,4	314.202,5	339.515,1	378.359,7

BAB V

PENUTUP

Renstra Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan. Renstra merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 dan juga pentahapan pembangunan nasional dari periode terakhir RPJP Tahun 2005-2025. Renstra disusun dengan masukan para pemangku kepentingan dalam rangka penguatan akuntabilitas Perpustakaan Nasional sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah tahun 2019 serta mempedomani Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra ini merupakan perwujudan visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Keselarasan Renstra Perpustakaan Nasional 2020-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 telah disesuaikan melalui metode *Balanced Scorecard* dengan empat perspektif, yakni: (i) *Stakeholders Perspective*, (ii) *Customers Perspective*; (iii) *Internal Process Perspective*, dan (iv) *Learning and Growth Perspective*.

Program perpustakaan dan literasi merupakan strategi dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan ditandai dengan meningkatnya nilai berbudaya literasi. Maka dimensi pembangunan bidang perpustakaan dibangun dalam dua dimensi yaitu peningkatan kegemaran membaca masyarakat dan pembangunan literasi masyarakat, yang diukur melalui: (1) ketersediaan infrastruktur layanan perpustakaan yang cukup; (2) ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia; (3) ekstensifikasi dan perluasan akses layanan perpustakaan di seluruh wilayah dalam upaya menjamin ketersediaan dan pemerataan koleksi bahan perpustakaan di semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia; (4) ketersediaan dan pemerataan tenaga perpustakaan, baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan dan seluruh wilayah Indonesia; (5) kampanye dan promosi perpustakaan dan keterlibatan masyarakat di perpustakaan. Melalui pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran yang integrative, komprehensif, tematik, dan spasial diharapkan akan terwujud

pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia serta perwujudan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sehingga terbentuk masyarakat yang perpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Renstra ini akan menjadi dasar untuk penyusunan Renstra unit kerja dan menjadi acuan dalam pengukuran kinerja Perpustakaan Nasional. Unit kerja Kedeputian dan Sekretariat Utama serta Biro/Pusat/Direktorat/Inspektorat/UPT di lingkungan Perpustakaan Nasional dan juga dievaluasi secara periodik dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan Renstra Perpustakaan Nasional ini, maka akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan kelembagaan dan pembangunan nasional.

1. MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
057-PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA									454.777,2	650.139,8	869.353,8	948.070,9	1.037.186,6	
	01-Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat													
	01-Nilai kegemaran membaca masyarakat		55,3	59,3	63,3	67,3	71,3	Nilai						
	02-Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		11	12	13	14	15	Indeks						
DM-Program Perpustakaan dan Literasi									256.847,5	420.402,4	555.151,3	608.555,8	658.826,9	Perpustakaan Nasional
	01-Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi													
	01-Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		1 : 16	1 : 15	1 : 14	1 : 13	1 : 12	Rasio						
	02-Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		1:20.000	1:19.000	1:18.000	1:17.000	1:16.000	Rasio						
	03-Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar		19,48	20,45	21,42	22,39	23,36	Persen						
	04-Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	Persen						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	02-Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara													
	01-Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		75,5	78,5	80,0	82,0	85,0	Nilai						
	02-Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan di PERPUSNAS		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	Persen						
	03-Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Menjadi Koleksi Nasional		5	5	5	5	5	Persen						
	04-Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno		18,43	18,43	19,79	21,18	22,57	Persen						
3004-Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara		Pusat							7.367,6	17.516,1	24.758,8	29.934,1	35.166,5	Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara
	01-Peningkatan Layanan Perpustakaan. Pelestarian dan Alih Media Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara/Kuno													
	01-Indeks pelayanan publik		3,80	3,85	3,91	3,97	4,01	Indeks						
	02-Tingkat kepuasan pemustaka		80	82	84	86	88	Nilai						
	03-Persentase peningkatan kunjungan pemustaka di Perpustakaan Nasional		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	Persen						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	dan Naskah Nusantara/Kuno													
	01-Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Perpustakaan		8,67	9,53	10,07	10,77	11,47	Persen						
	02-Persentase Peningkatan Bahan Perpustakaan yang di Alih Mediakan		8,34	8,90	9,72	10,41	11,10	Persen						
3010-Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno		Kota Blitar							2.775,7	4.970,5	5.937,7	6.459,8	7.518,4	UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno
	01-Peningkatan Layanan Perpustakaan, Pelestarian dan Alih Media Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara/Kuno													
	01-Jumlah Pemustaka Perpustakaan Proklamator Bung Karno		293.974	1.000.000	1.300.000	1.500.000	2.000.000	Orang						
	02-Tingkat Kepuasan Pemustaka Perpustakaan Proklamator Bung Karno		80	81	82	83	84	Nilai						
	03-Jumlah Dokumen Kajian dan Kebijakan Pengembangan Layanan Perpustakaan Proklamator Bung Karno		3	3	3	3	3	Dokumen						
	02-Terlaksananya layanan umum UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno													
	01-Pengelolaan Layanan Administrasi Perpustakaan Bung Karno		1	1	1	1	1	Layanan						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	02-Indeks Pengelolaan Aset		3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	Indeks						
4380-Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan		Pusat							57.852,4	76.414,1	91.570,9	95.817,9	103.289,5	Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan
	01-Peningkatan Koleksi Nasional, Deposit dan Bibliografi serta Pengolahan Bahan Perpustakaan yang Lengkap dan Mutakhir													
	01-Persentase Peningkatan Jumlah Koleksi KCKR yang Terhimpun		5	5	5	5	5	Persen						
	02-Persentase Penambahan Koleksi Nasional Perpustakaan yang Lengkap		5	6	7	8	9	Persen						
4381-Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan		Pusat							3.087,2	4.285,9	4.695,0	5.000,5	5.180,8	Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
	01-Peningkatan Koleksi Nasional, Deposit dan Bibliografi serta Pengolahan Bahan Perpustakaan yang Lengkap dan Mutakhir													
	01-Persentase Peningkatan Layanan ISBN dan ISMN		5	5	5	5	5	Persen						
	02-Persentase Peningkatan Penyusunan Literatur Sekunder		5	5	5	5	5	Persen						
	03-Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan Yang Diolah		10	10	10	10	10	Persen						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
4382-Pengelolaan Data dan Informasi		Pusat							18.992,3	14.499,1	14.966,0	17.098,9	21.432,6	Pusat Data dan Informasi
	01-Penguatan Sistem Informasi Perpustakaan Yang Terpadu													
	01-Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan		3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	Persen						
	02-Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi		75	75	78	81	84	Skala						
	03-Persentase implementasi SMKI berbasis ISO27001		20	20	45	70	100	Persen						
	04-Persentase Manajemen Layanan TIK berbasis ISO20000(IT Service Management system)		10	10	40	70	100	Persen						
4383-Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan		Pusat							3.139,4	3.445,1	3.701,6	3.983,8	4.294,2	Direktorat Standardisasi dan Akreditasi
	01-Tersedianya kebijakan dan pengkajian perpustakaan. pembudayaan gemar membaca dan literasi													
	01-Perpustakaan yang memenuhi standard		900	900	990	1089	1198	Perpus						
	02-NSPK bidang perpustakaan yang diterbitkan		6	6	7	8	9	Naskah						
4384-Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus		Pusat							122.871,4	235.139,2	282.717,8	303.124,9	325.160,4	Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	01-Pengelolaan Administrasi Perkantoran Perpustakaan Bung Hatta		1	1	1	1	1	Layanan						
	02-Indeks Pengelolaan Aset		3	3	3	3	3	Indeks						
WA-Program Dukungan Manajemen									197.929,7	229.737,4	314.202,5	339.515,1	378.359,7	Perpustakaan Nasional
	01-Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Perpustakaan Nasional Yang Baik dan Handal													
	01-Indeks Reformasi Birokrasi PERPUSNAS		75	80	85	90	95	Indeks						
	02-Indeks SPBE		3,06	3,20	3,34	3,48	3,62	Indeks						
	03-Opini BPK atas Laporan Keuangan PERPUSNAS		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini						
	04-Indeks Persepsi Anti Korupsi		3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	Indeks						
3067-Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno		Kota Blitar							8.639,6	9.442,4	10.386,7	11.425,4	12.567,9	UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno
	01-Terlaksananya layanan perkantoran UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno													
	01-Persentase realisasi pembayaran gaji dan tunjangan		99	99	99	99	99	Persen						
	02-Persentase realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor		98	98	98	98	98	Persen						
3069-Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta		Kota Bukit							4.659,5	5.093,9	5.603,3	6.163,7	6.780,0	UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	internal Perpunas yang efektif dan efisien													
	01-Tingkat maturitas SPIP PERPUSNAS		3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	Nilai						

2. MATRIKS PRIORITAS

PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT / SUB OUTPUT	PN	MP	TARGET	SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)
DM-Program Perpustakaan dan Literasi						2020 : 256.847,5 2021 : 420.402,4 2022 : 555.151,3 2023 : 608.555,8 2024 : 658.826,9
3004-Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara	004-Alih aksara, alih bahasa dan penelitian naskah kuno	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 01-Pengembangan budaya kegemaran membaca		2020 : 50 2021 : 50 2022 : 75 2023 : 125 2024 : 175	Naskah	2020 : 7.367,6 2021 : 17.516,1 2022 : 24.758,8 2023 : 29.934,1 2024 : 35.166,5
	001-Tanpa Sub Output	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN				

PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT / SUB OUTPUT	PN	MP	TARGET	SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)
		PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 01-Pengembangan budaya kegemaran membaca				
3005- Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	001-Jumlah Peserta Diklat Perpustakaan	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 01-Pengembangan budaya kegemaran membaca		2020 : 638 2021 : 1100 2022 : 1715 2023 : 1886 2024 : 2035	Orang	2020 : 8.991,6 2021 : 10.016,5 2022 : 22.271,0 2023 : 25.158,6 2024 : 27.612,7
	001-Tanpa Sub Output	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 01-Pengembangan budaya kegemaran membaca				
3008- Pembinaan Pustakawan	001-Perserta sertifikasi dan uji kompetensi Pustakawan	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 01-Pengembangan budaya kegemaran membaca		2020 : 400 2021 : 830 2022 : 872 2023 : 915 2024 : 961	Orang	2020 : 7.632,0 2021 : 6.014,5 2022 : 7.535,5 2023 : 8.088,2 2024 : 9.495,4
3009- Preservasi dan	001-Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN		2020 : 33615 2021 : 37015	Eksemplar	2020 : 6.739,5 2021 : 8.349,7

PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT / SUB OUTPUT	PN	MP	TARGET	SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)
Alih Media Bahan Perpustakaan	yang dikonservasi	<p>PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER</p> <p>KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi</p> <p>PPN : 02-Pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi</p>		<p>2022 : 39023</p> <p>2023 : 41735</p> <p>2024 : 43014</p>		<p>2022 : 10.190,9</p> <p>2023 : 11.183,2</p> <p>2024 : 12.335,3</p>
	001-Penjilidan Bahan Perpustakaan	<p>PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN</p> <p>PP : 02-MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA</p> <p>KP : 02-Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat</p> <p>PPN : 03-Pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat</p>				
	001-Alih media bahan pustaka dan naskah kuno dalam bentuk CD dan file akses	<p>PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN</p> <p>PP : 02-MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA</p> <p>KP : 02-Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat</p> <p>PPN : 03-Pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat</p>				
	001-Tanpa Sub	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN				

PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT / SUB OUTPUT	PN	MP	TARGET	SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)
	Ouput	KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 01-Pengembangan budaya kegemaran membaca				
	002-Konservasi Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 02-MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA KP : 02-Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat PPN : 03-Pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat				
	002-Alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 02-MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA KP : 02-Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat PPN : 03-Pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat				
3010-	004-Layanan	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN		2020 : 5	Kegiatan	2020 : 2.775,7

PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT / SUB OUTPUT	PN	MP	TARGET	SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)
Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno	KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 03-Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial		2021 : 10 2022 : 11 2023 : 12 2024 : 13		2021 : 4.970,5 2022 : 5.937,7 2023 : 6.459,8 2024 : 7.518,4
	001-Tanpa Sub Output	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 03-Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial				
4380-Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	002-Koleksi KCKR yang Terhimpun	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 02-Pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi		2020 : 350000 2021 : 367500 2022 : 385875 2023 : 405169 2024 : 425428	Eksemplar	2020 : 57.852,4 2021 : 76.414,1 2022 : 91.570,9 2023 : 95.817,9 2024 : 103.289,5
4382-Pengelolaan Data dan Informasi	002-Pengembangan dan Tata Kelola Infrastruktur TIK	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi		2020 : 4 2021 : 4 2022 : 3 2023 : 3 2024 : 4	Paket	2020 : 18.992,3 2021 : 14.499,1 2022 : 14.966,0 2023 : 17.098,9 2024 : 21.432,6

PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT / SUB OUTPUT	PN	MP	TARGET	SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)
		PPN : 03-Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial				
4384- Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	001-Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Umum	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 03-Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial		2020 : 400 2021 : 400 2022 : 440 2023 : 484 2024 : 532	Perpustakaan	2020 : 122.871,4 2021 : 235.139,2 2022 : 282.717,8 2023 : 303.124,9 2024 : 325.160,4
	001-Tanpa Sub Output	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 03-Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial				
	001-Tanpa Sub Output	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 03-Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial				
4385- Pengembangan	001-Pembinaan dan Pengembangan	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN		2020 : 150 2021 : 150	Perpustakaan	2020 : 2.630,0 2021 : 11.714,7

PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT / SUB OUTPUT	PN	MP	TARGET	SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)
Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi	Perpustakaan Sekolah	PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 01-Pengembangan budaya kegemaran membaca		2022 : 794 2023 : 999 2024 : 1000		2022 : 51.985,9 2023 : 64.239,1 2024 : 65.372,1
	001-Tanpa Sub Output	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 01-Pengembangan budaya kegemaran membaca				
4386-Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca dan Literasi	002-Lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 01-Pengembangan budaya kegemaran membaca		2020 : 77 2021 : 100 2022 : 130 2023 : 145 2024 : 160	Lokasi	2020 : 12.355,0 2021 : 23.551,5 2022 : 29.792,4 2023 : 33.150,5 2024 : 36.465,6
	001-Tanpa Sub Output	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 01-Pengembangan budaya kegemaran membaca				
5272-Pengelolaan	004-Layanan perpustakaan	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN		2020 : 0 2021 : 465	Orang	2020 : 2.413,4 2021 : 4.485,5

PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT / SUB OUTPUT	PN	MP	TARGET	SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)
Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	berbasis inklusi sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 03-Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial		2022 : 500 2023 : 550 2024 : 600		2022 : 5.027,8 2023 : 5.316,2 2024 : 5.503,3
	001-Tanpa Sub Output	PN : 04-REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PP : 04-PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER KP : 01-Peningkatan Budaya Literasi PPN : 03-Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial				

MATRIK KERANGKA REGULASI PERPUSTAKAAN NASIONAL

NO.	Arah Strategi Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Amanat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Kementerian Hukum dan HAM 	Tahun 2020
2.	Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Amanat Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional 2. Kementerian Hukum dan HAM 	Tahun 2021
3.	Revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Berdasarkan evaluasi beberapa pasal seperti Dewan Perpustakaan dan Ketentuan lain tidak dijalankan dengan optimal	Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERPUSNAS 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Kementerian/Lembaga 4. Pemerintah Daerah 	Tahun 2024
4.	Revisi Keputusan Presiden Nomor 103	Evaluasi Kelembagaan	Biro Hukum,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 	Tahun 2020

NO.	Arah Strategi Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian	Perpustakaan Nasional	Organisasi, Sama, Hubungan Masyarakat Kerja dan	Reformasi Birokrasi 2. Kementerian Hukum dan HAM 3. Sekretariat Negara 4. Kementerian Keuangan	

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO